



DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



HARHUBNAS 2021

Bergerak Harmonikan Indonesia



NEWSLETTER

infoHUBDAT

Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat



BERGERAK HARMONIKAN INDONESIA HARHUBNAS 2021

INFO KHUSUS

**Dukungan
Kemenhub
untuk PON XX
Papua**

Demi mendukung kesuksesan pelaksanaan PON XX dan PEPARNAS XVI Papua, Kementerian Perhubungan memberikan bantuan antara lain berupa penyediaan 428 bus untuk transportasi atlet dan official. Pengiriman bus dari Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan kapal KM Dharma Rucitra I dan KM Dharma Kencana VII.

Suasana loading bus bantuan Kemenhub untuk PON XX dan PEPARNAS XVI Papua ke kapal KM Dharma Rucitra I di Pelabuhan Tanjung Priok, 21/8/2021.
Foto: HMS DJPD/WBW



PERINGATAN HARI PERHUBUNGAN NASIONAL 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 195 Tahun 2021 tentang Penunjukan Ketua Panitia Pusat Hari Perhubungan Nasional Tahun 2021, Direktur Jenderal Perhubungan Darat ditetapkan sebagai Ketua Panitia Pusat Hari Perhubungan Nasional Tahun 2021. Kemudian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-

DRJD 2737 Tahun 2021, dibentuklah Panitia Penanggung Jawab Penyelenggara Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2021.

Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2021 ini, dimeraikan dengan serangkaian kegiatan antara lain: Kick-Off HARHUBNAS Tahun 2021; Bakti Sosial; Webinar Series; Renungan & Doa Untuk Negeri dan Upacara Peringatan Harhubnas Tahun 2021; Launching Kampanye Kolaboratif Lintas Subsektor Kementerian Perhubungan Ke-3 Tahun 2021 (Periode: September - Desember 2021) "Insan Transportasi Melayani Negeri" melalui Dialog Publik; Pelantikan Perwira Transportasi; Lomba Video Dalam Rangka Harhubnas 2021 Tiktok Competition Harhubnas 2021 "Aku dan Transportasi"; dan Penutupan Rangkaian Harhubnas Tahun 2021.



Assalamualaikum Wr.Wb.

Apa kabar pembaca setia *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman? Bersua kembali bersama *Newsletter* infoHUBDAT yang menjadi salah satu media bagi kita untuk berbagi informasi. Teriring salam hangat dan doa kepada pembaca sekalian semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada beberapa hal yang menjadi catatan, dengan harapan dapat menjadi motivasi dan refleksi kita bersama dalam memberikan pelayanan jasa transportasi darat kepada masyarakat.

Pembaca yang budiman, saat ini Indonesia dan dunia belum benar-benar lepas dari pandemi Covid-19. Meski tren penurunan statistik kasus Covid-19 di berbagai daerah cukup menggembirakan dan jumlah masyarakat yang telah divaksin juga semakin banyak, namun kita tetap tak boleh lengah. Protokol kesehatan harus selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Perhubungan terus memperbarui regulasi terkait dengan persyaratan perjalanan sesuai dengan perkembangan terkini kasus Covid-19 dan juga kebijakan dari Satgas Penanganan Covid-19 Nasional.

Kita harus mampu menyikapi segala perubahan. Seperti yang disampaikan Menteri Perhubungan ketika membuka acara Harhubnas 2021, bahwa insan perhubungan harus terus berinovasi dan berkreasi menghadapi disrupsi yang terjadi di sektor transportasi seperti: pandemi Covid-19, digitalisasi, dan perubahan yang terjadi di industri sektor transportasi baik di dalam maupun di luar negeri. Kita harus mengubah tidak hanya pola pikir, tetapi juga pola kerja, pola organisasi, reformasi digitalisasi, dan menciptakan etos kerja baru,

Pembaca sekalian, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga berkontribusi terhadap upaya penanganan Covid-19 dengan menyelenggarakan kegiatan vaksinasi massal dan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat di sejumlah wilayah. Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersinergi dengan TNI, Polri, BUMN, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lain yang terkait. Masyarakat menyambut baik kegiatan ini, dan diharapkan dengan percepatan vaksinasi Covid-19 yang telah dilakukan dapat segera membawa bangsa kita mencapai *herd immunity* atau kekebalan komunal.

Masih banyak tugas yang menanti untuk dikerjakan, masih banyak masalah yang menunggu untuk diselesaikan. Namun tetaplah bersemangat, dan lakukanlah tugas dengan ikhlas hati. Saya sampaikan juga himbauan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, baik diri pribadi maupun lingkungan sekitar. Tetap jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, jika keluar rumah, selalu kenakan masker, dan terapkan protokol kesehatan. Bagi rekan-rekan yang harus bertugas di lapangan, saya sampaikan apresiasi dan terimakasih. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa eksistensi kita berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara tercinta. Tetap semangat dan tetap sehat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya pada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.





Foto Cover:
BKIP/Daniel Pietersz

Penyerahan bendera Pataka Harhubnas 2021 dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi pada saat *Kick Off* Harhubnas 2021, Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, 1 September 2021.

PENANGGUNG JAWAB
Marta Hardisarwono

REDAKTUR PELAKSANA
Endy Irawan

REDAKTUR UTAMA
Pitra Setiawan
Nanang Rahardjo
Azna

REDAKTUR
Ardian Sukmaji
Dinda Siahaan
Alvia Lilian
Hanna Suryadika

DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFI
M. Aulia Dharma
Herman Wibowo
Bayu Adi Saputro
Andrew Bryan Agustinus

SEKRETARIAT
Bejo Sri Wahono
Ratna Syaka Aprilda
Sari Hayu Hutami
Ely Rusnita
Nurhayati
Yudha Kurniawan
Kurniadi Zaini
Didik Prasetyo
Rifai Dyan Armananta
Nolita
Rusdinal
Achmad Nanang
Rosmala Damayanti
Nova Yulianasari Sopiah
Reza Saputra
Nurfadilah Sinta Ningrum
Ade Yunita
Rajib

KONTRIBUTOR
Junedi Sembiring
Nurita Aprilianing Tyas
Marisa
Wahyu Arya Putra
Prisca Magdalena Samosir
Arief Eko Sumba
Cristian Andri Mardhani
Laurence
Erlieka Affan
Ririn Scorviyanti
Rinto Mahendra Raharjo



Diterbitkan oleh:

Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Gedung Karya Lantai 12
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 8
Jakarta Pusat 10110
Telp./Fax. : (021) 3506141

email : humas.hubdat@gmail.com

website : <http://hubdat.dephub.go.id/>

 @hubdat151

 ditjen perhubungan darat

 @ditjen_hubdat

 ditjen perhubungan darat

Info Redaksi

Pembaca *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman,

Bolehlah kita sedikit gembira terhadap tren penurunan kasus Covid-19 dan penurunan level PPKM di berbagai daerah. Geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mulai bergerak, diiringi pelonggaran mobilitas dan kegiatan masyarakat. Namun jangan lengah, kita belum benar-benar lepas dari jerat pandemi, tetaplah jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi segera pergi.

Para pembaca yang budiman, pada edisi kali ini, *Newsletter* infoHUBDAT menampilkan Laporan Utama mengenai Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2021. Beberapa artikel telah kami siapkan untuk mendukung laporan utama, antara lain: Momentum Insan Transportasi Ciptakan Etos Kerja Baru, dan Menhub Ajak Insan Perhubungan Terus Bergerak Harmonikan Indonesia.

Kemudian, kami sajikan pula laporan khusus Dukungan Kemenhub untuk Percepatan Vaksinasi Covid-19, dan juga laporan khusus mengenai Dukungan Kemenhub untuk PON XX dan PEPARNAS XVI Papua.

Tak kalah menarik, ulasan mengenai Peran Penting Transportasi Dalam Sistem Logistik. Selain itu juga artikel bertajuk Meningkatkan Keselamatan Angkutan Barang. Diikuti dengan artikel tentang kehadiran sistem *Buy The Service* untuk angkutan umum perkotaan melalui Teman Bus di Makassar dan Banjarmasin.

Kami sajikan pula artikel mengenai upaya penangan travel gelap dalam Memberantas Angkutan Ilegal. Dilengkapi dengan tulisan dari pengamat transportasi dengan artikel bertajuk Masa Pandemi, Angkutan Ilegal Meningkatkan, serta Angkutan Pelat Hitam Lecehkan Institusi Negara.

Selain itu, ada pula ulasan mengenai kegiatan Bincang-bincang Santai Koalisi Teman Sehati (Tetap Aman Selamat di Jalan dan Hati-hati) yang merupakan rangkaian kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2021.

Sebuah artikel tentang peresmian kapal penyeberangan turut melengkapi edisi kali ini yaitu artikel KMP. Tirus Meranti Layani Lintas Penyeberangan Pecah Buyung - Alai Insit.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pun telah kami himpun dan kami sajikan kepada pembaca sekalian dalam infoSelintas. Di bagian akhir, kami sajikan rekaman gambar peristiwa dan kegiatan unit kerja terkait melalui bidikan lensa. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan para pembaca sekalian. (*)

daftar isi

EDISI TRIWULAN 03 / 2021



Pakaian Adat
Menteri Perhubungan bersama para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan mengenakan kostum pakaian adat nusantara pada Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2021 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, 17/9/2021. Foto: HMS DJPD/BYU



Info Utama

04 BERGERAK HARMONIKAN INDONESIA

Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) yang dilaksanakan setiap tanggal 17 September merupakan sebuah momentum penting untuk mengingat kembali suatu peristiwa bersejarah di bidang perhubungan dalam mewujudkan konektivitas di Indonesia.

- 06 Momentum Insan Transportasi Ciptakan Etos Kerja Baru
- 08 Menhub Ajak Insan Perhubungan Terus Bergerak Harmonikan Indonesia



Info Selintas

- 36 Ditjen Hubdat Temukan 16 Penumpang Bus AKAP Tanpa Persyaratan Lengkap
- Kemenhub Luncurkan Aplikasi Mobile Sistem Perlengkapan Jalan SIP-AJA
- Gelar Webinar Internasional, Ditjen Hubdat Ajak Generasi Muda Kampanyekan Keselamatan Jalan
- Upayakan Kurangi Emisi Kendaraan, Kemenhub-ITDP Indonesia Teken Nota Kesepahaman
- Kemenhub Berikan Bantuan Paket Sembako Bagi Mitra Transportasi di Bandung
- Dibutuhkan Masyarakat Selama PPKM Darurat, Ojol Boleh Melintas Penyekatan
- Pengguna Jasa Penyeberangan Diimbau Lengkapi Syarat Perjalanan

Info Khusus

- 10 Dukungan Kemenhub untuk Percepatan Vaksinasi Covid-19
- 18 Dukungan Kemenhub untuk PON XX Papua

Info Angkutan

- 18 Peran Penting Transportasi Dalam Sistem Logistik
- 20 Meningkatkan Keselamatan Angkutan Barang
- 22 Teman Bus Siap Layani Masyarakat Makassar
- 24 Teman Bus Hadir Layani Masyarakat Banjarmasin

Info Sarana

- 32 Jaga Laju 30 Koalisi Teman Sejati

Info Lalu Lintas

- 26 Memberantas Angkutan Ilegal
- 28 Masa Pandemi Angkutan Ilegal Meningkatkan Pesat
- 30 Angkutan Pelat Hitam Lecehkan Institusi Negara

Info Prasarana

- 38 Ditjen Hubdat Gelar Sosialisasi PM 24/2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Info TSDP

- 34 KMP. Tirus Meranti Layani Lintas Pecah Buyung-Alai Insit

Lensa Hubdat



- 41 Rekaman Berbagai Peristiwa yang Terjadi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Melalui Bidikan Lensa

INFO UTAMA

Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menerima bendera Pataka Harhubnas 2021 dari Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, sebagai tanda dimulainya rangkaian kegiatan Hari Perhubungan Nasional 2021, di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, 1/9/2021. Foto: BKIP/ Daniel Pieterz



BERGERAK HARMONIKAN INDONESIA HARHUBNAS 2021

Oleh: Tim infoHUBDAT

Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) yang dilaksanakan setiap tanggal 17 September merupakan sebuah momentum penting untuk mengingat kembali suatu peristiwa bersejarah di bidang perhubungan dalam mewujudkan konektivitas di Indonesia.

Pada awalnya, setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perhubungan memiliki hari jadi atau hari bakti masing-masing yang waktunya relatif berdekatan. Hal ini seringkali menyebabkan tidak efisien dari segi waktu dan biaya. Akhirnya, pada Tahun 1971 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.274/G/1971 tanggal 26 Agustus 1971 tentang Hari Perhubungan Nasional, hari jadi atau hari bakti tiap BUMN sektor perhubungan disatukan menjadi Harhubnas yang diperingati setiap tanggal 17 September.

Peringatan Harhubnas sesuai SK. 274/G/1971 tanggal 26 Agustus 1971 memiliki 3 tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatkan rasa kebersamaan dan jiwa

korsa warga perhubungan serta dengan mitra kerja jasa perhubungan pada umumnya

2. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab untuk selalu ikut membudayakan peningkatan pelayanan yang lebih baik
3. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan 5 citra manusia perhubungan

Harhubnas 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 195 Tahun 2021 tentang Penunjukan Ketua Panitia Pusat Hari Perhubungan Nasional Tahun 2021, Direktur Jenderal Perhubungan Darat ditetapkan sebagai Ketua Panitia Pusat Hari Perhubungan Nasional Tahun 2021. Kemudian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 2737 Tahun 2021, dibentuklah Panitia Penanggung Jawab Penyelenggara Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2021.

Dalam pelaksanaan Harhubnas 2021 ini Kementerian Perhubungan mengusung tema Bergerak Harmonikan Indonesia. Dengan tema ini maka harapannya adalah kita saling bekerja sama, bergerak, serta berkolaborasi antar unsur-unsur di Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, maupun stakeholder lainnya. Bergerak Harmonikan Indonesia juga bermakna kita dapat mengesampingkan ego sektoral sehingga mampu membawa perubahan lebih baik bagi sektor transportasi dan memberikan pelayanan paling prima bagi masyarakat Indonesia. Tema dan juga logo Harhubnas tahun ini diharapkan dapat membawa perubahan dalam bentuk inovasi dan kreasi untuk menciptakan sebuah harmoni, keindahan yang berpadu dalam semangat kebangsaan. Dengan komitmen dan peningkatan kualitas serta daya saing SDM transportasi

yang saling bersinergi menjadi hal utama guna mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan selamat.

Rangkaian Kegiatan Harhubnas 2021

1. Kick-Off HARHUBNAS Tahun 2021
2. Bakti Sosial
3. Webinar Series
4. Renungan & Doa Untuk Negeri dan Upacara Peringatan Harhubnas Tahun 2021
5. Launching Kampanye Kolaboratif Lintas Subsektor Kementerian Perhubungan Ke-3 Tahun 2021 (Periode: September - Desember 2021) "Insan Transportasi Melayani Negeri" melalui Dialog Publik
6. Pelantikan Perwira Transportasi
7. Lomba Video Dalam Rangka Harhubnas 2021
8. Tiktok Competition Harhubnas 2021 "Aku dan Transportasi"
9. Penutupan Rangkaian Harhubnas Tahun 2021

Tema Harhubnas 2021: Bergerak Harmonikan Indonesia

Melalui Hari Perhubungan Nasional 2021, dapat menjadi motivasi bagi seluruh sektor transportasi untuk terus maju bekerjasama menghadirkan layanan transportasi yang dinamis dan dapat menciptakan perubahan bagi Indonesia yang lebih baik.

Logo Harhubnas 2021

Harhubnas pada tahun 2021 mengusung tema "Bergerak Harmonikan Indonesia". Elemen-elemen yang dapat memenuhi tema tersebut adalah sinergi dan pergerakan. Elemen sinergi dapat dicapai melalui bentuk-bentuk lingkaran dan elemen dari pergerakan dapat dicapai melalui bentuk lingkaran yang diregangkan secara memanjang. Pergerakan lingkaran yang bersinergi tersebut mendorong Kementerian Perhubungan untuk terus maju menghadirkan transportasi yang lebih baik demi mencapai Indonesia yang lebih harmonis.(*)



HARHUBNAS 2021

Bergerak Harmonikan Indonesia

Elemen Visual



Warna



Kesatuan



Pergerakan



Sinergi

MOMENTUM INSAN TRANSPORTASI CIPTAKAN ETOS KERJA BARU

Kementerian Perhubungan, pada Rabu (1/9) secara resmi memulai rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2021 yang jatuh pada 17 September 2021. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hadir langsung membuka kegiatan *kick off* rangkaian kegiatan Harhubnas 2021 yang berlangsung secara virtual dan disaksikan oleh para insan perhubungan di Indonesia, baik dari unsur Kemenhub, Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota, Operator BUMN/Swasta sektor transportasi, dan stakeholder terkait lainnya.

Saat membuka acara Harhubnas, Menhub menyampaikan apresiasinya kepada seluruh insan transportasi yang selama ini telah bekerja keras, di tengah adanya disrupsi yang terjadi di sektor transportasi seperti: pandemi Covid-19, digitalisasi, dan perubahan yang terjadi di industri sektor transportasi baik di dalam maupun di luar negeri.

“Mari kita jadikan Harhubnas ini sebagai momentum agar kita terus berinovasi dan berkreasi menghadapi perubahan dan disrupsi yang terjadi. Kita harus

mengubah mulai dari pola pikir, pola kerja, pola organisasi, reformasi digitalisasi, dan menciptakan etos kerja baru,” jelas Menhub.

Secara khusus, Menhub

mengapresiasi para insan transportasi, yang telah turut mendukung program vaksinasi massal dalam rangka mempercepat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Presiden meminta untuk kita membuat *road map* bagaimana proses penanganan pandemi dilakukan, dan masing-masing sektor harus berkreasi, termasuk sektor transportasi. Alhamdulillah Kita masuk 7 besar sebagai negara yang sukses melakukan program vaksinasi,” ungkap Menhub.

Selanjutnya, Menhub meminta insan transportasi untuk memiliki jejaring tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, agar mengantisipasi

“Mari kita jadikan Harhubnas ini sebagai momentum agar kita terus berinovasi dan berkreasi menghadapi perubahan dan disrupsi yang terjadi.”

Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan

perkembangan terkini industri transportasi yang sedang terjadi di luar negeri.

“Disrupsi itu ada di mana-mana termasuk di sektor transportasi. Seperti angkutan yang saat ini sudah berbasis digital seperti ojek online, lalu ada angkutan ilegal plat hitam, sampai ke permasalahan logistik internasional dengan adanya kelangkaan kontainer. Oleh karena itu, kita harus memiliki link yang baik dengan dunia internasional agar kita mengetahui fakta yang terjadi untuk dicarikan solusinya,” kata Menhub.



Lebih lanjut, Menhub mengajak segenap insan transportasi untuk bekerja dengan hati melayani masyarakat, dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa transportasi, agar dapat mewujudkan pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman dan sehat.

“Momen Harhubnas bukan sekedar selebrasi, tetapi jadikan suatu momentum yang berarti bagi diri kita, organisasi, bangsa dan negara, dan masyarakat,” ujar Menhub.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi selaku ketua Panitia Harhubnas Tahun 2021 menyampaikan, peringatan Harhubnas yang dilaksanakan setiap tanggal

17 September merupakan sebuah momentum penting untuk mengingat kembali suatu peristiwa bersejarah di bidang perhubungan dalam mewujudkan konektivitas di Indonesia.

Pada tahun 2021 ini, pelaksanaan Harhubnas mengusung tema “Bergerak, Harmonikan Indonesia”. Melalui tema ini diharapkan insan perhubungan yang terdiri dari berbagai unsur seperti Kemenhub, Pemerintah Daerah, maupun stakeholder lainnya, dapat saing bekerja sama bergerak, serta berkolaborasi dengan baik, serta dapat mengesampingkan ego sektoral sehingga mampu membawa perubahan lebih baik bagi sektor transportasi dan memberikan pelayanan

paling prima bagi masyarakat Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Budi juga menyampaikan sejumlah kegiatan yang akan dilakukan selama masa peringatan Harhubnas Tahun 2021, yakni : Ziarah (Doa dan Renungan); Upacara Harhubnas 2021; Bakti Sosial dan Kebersihan Lingkungan; Donor Plasma Konvalesen di lingkungan Kementerian Perhubungan; Webinar Perhubungan Mengajar; Peresmian Sarana Prasarana Transportasi; Webinar Keselamatan Transportasi; Peluncuran Buku Transportasi; Dialog Publik; Lomba Video/Film Pendek Keselamatan Transportasi dan Tiktok terkait Transportasi(*).

INFO UTAMA

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak seluruh unsur di sektor transportasi terus bergerak maju dan berani berubah, untuk memberi sumbangsih terbaik bagi kemajuan transportasi, yang pada akhirnya memberi harmoni bagi bangsa dan negara kita. Hal ini sesuai dengan tema Hari Perhubungan Nasional tahun 2021 yakni Bergerak Harmonikan Indonesia.

“Momentum Hari Perhubungan Nasional Tahun 2021 dapat diikuti dengan sepenuh hati sehingga dapat memperteguh semangat dan bakti yang tak henti untuk Ibu Pertiwi. Mari bersama Bergerak Harmonikan Indonesia,” ucap Menhub pada Upacara Hari Perhubungan Nasional 2021 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jakarta, Jumat (17/9).

Menhub menyampaikan Hari Perhubungan Nasional 2021 ini merupakan momentum yang tepat bagi Insan Perhubungan untuk terus memperbaiki kinerja di sektor transportasi, sekaligus merefleksikan apa yang sudah dilakukan dan karya apa lagi yang dapat diwujudkan ke depannya bagi bangsa dan negara.

Menhub mengungkapkan, Indonesia telah masuk tahun ke 2 pandemi Covid 19. Akibatnya, tatanan di berbagai sektor mau tidak mau harus berubah, termasuk di sektor transportasi. Di sisi lain insan perhubungan harus tetap bekerja membangun berbagai infrastruktur transportasi sebagai tugas dan fungsi utamanya dan juga melayani secara cermat dan apik.

“Untuk melakukannya tentu tidak mudah, perlu inovasi dan terobosan tapi juga kehati-hatian. Yang tidak kalah penting adalah juga perubahan cara pandang untuk melihat perubahan lingkungan ini sebagai sebuah tantangan yang di baliknya selalu ada peluang,” jelas Menhub.



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan sambutan pada saat Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2021 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jakarta (17/9/2021). Foto: BKIP

MENHUB AJAK INSAN PERHUBUNGAN TERUS BERGERAK HARMONIKAN INDONESIA



BERGERAK HARMONIKAN INDONESIA

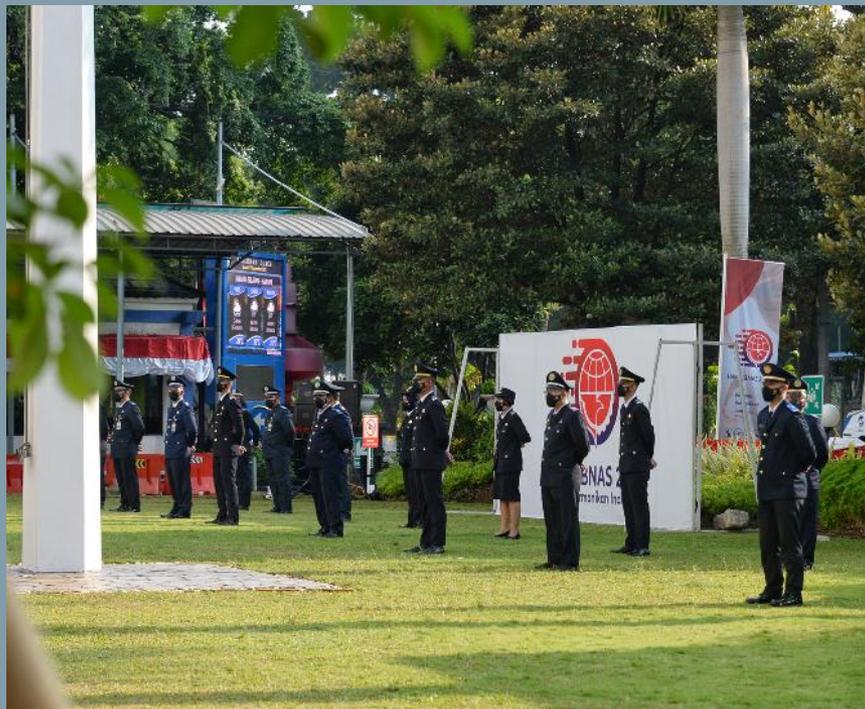
kegiatan tersebut di antaranya *Kick-off* Harhubnas 2021 yang telah digelar pada 1 September yang lalu; Donor darah dan plasma konvalesen; Bakti Sosial, Kebersihan Lingkungan dan Ziarah ke makam pahlawan; Webinar Perhubungan Mengajar dan Webinar Keselamatan Transportasi; Launching Kampanye Kolaboratif “Insan Transportasi Melayani Negeri”, Perlombaan Film Pendek Keselamatan Transportasi, Tiktok Competition Harhubnas ‘Aku dan Transportasi’; serta Pelantikan Perwira Transportasi.

Turut hadir secara langsung mengikuti upacara Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan dan diikuti secara virtual oleh pegawai Kemenhub di seluruh Indonesia serta stakeholder Perhubungan baik dari pemerintah daerah maupun BUMN.(*)

Lebih lanjut Menhub mengatakan, insan transportasi memiliki tugas yang mulia untuk mewujudkan konektivitas yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah di seluruh Indonesia. Tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk jangka panjang, dimana tantangan yang dihadapi tentu juga akan lebih besar.

“Transportasi yang lebih berkelanjutan, lebih ramah lingkungan akan menjadi sebuah keniscayaan,” ujar Menhub.

Dalam rangka memperingati Harhubnas, sejumlah kegiatan telah disiapkan untuk dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh insan transportasi, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Kegiatan-



Kementerian Perhubungan turut mendukung suksesnya kegiatan vaksinasi massal nasional. Dengan menggandeng pihak-pihak terkait dan bersinergi dengan berbagai instansi, Kementerian Perhubungan turut mendukung percepatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Tercatat sejumlah kegiatan vaksinasi massal telah dilaksanakan di beberapa lokasi di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan. Antara lain kegiatan serbuan vaksinasi bersama TNI AL di simpul-simpul transportasi, kolaborasi dengan Polri gelar vaksinasi di Terminal Jatijajar Depok, serta sinergi dengan Setneg dan Kementerian BUMN untuk selenggarakan vaksinasi massal di Bojonegoro. Mari kita simak ulasan masing-masing kegiatan vaksinasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perhubungan.

Kemenhub Gelar Vaksinasi di Terminal Tipe A

Kementerian Perhubungan tengah menggelar program vaksinasi di beberapa simpul transportasi di 12 lokasi Terminal Tipe A yang tersebar di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mulai hari ini, Kamis (15/7) secara bertahap di Terminal Tipe A ini akan dilakukan vaksinasi secara gratis terhadap mitra Perhubungan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyatakan bahwa Ditjen Hubdat tengah berkoordinasi dengan beberapa pihak dengan target sebanyak 10.000 dosis vaksin. "Saat ini sedang kami siapkan program vaksinasi dengan tim vaksinator dari BKKBN. Kami menargetkan mitra Perhubungan yang akan divaksinasi dalam kegiatan ini mencapai 10.000 orang. Hingga saat ini ada 7.173 peserta yang sudah terdaftar," kata Dirjen Budi.

Kegiatan vaksinasi ini sedianya akan menyasar target sejumlah pengemudi bus, kondektur, dan

DUKUNGAN KEMENHUB UNTUK PERCEPATAN VAKSINASI COVID-19

Dengan semakin banyak masyarakat yang telah divaksin akan mempercepat bangsa Indonesia menuju *herd immunity* atau kekebalan komunal. Kementerian Perhubungan berkontribusi terhadap hal ini melalui kegiatan percepatan vaksinasi Covid-19 di sejumlah lokasi, menggandeng TNI, Polri, BUMN, serta pemerintah daerah.

mitra-mitra Perhubungan lainnya. Saat ini kegiatan vaksinasi yang sudah tersedia vaksin dan tenaga medisnya yakni di Terminal Tipe A Guntur Garut dan Terminal Tipe A Indihiang Tasikmalaya.

"Kegiatan vaksinasi di Garut dan Tasikmalaya dimulai hari ini, 15 Juli 2021. Sementara Terminal Leuwipanjang akan memulai vaksinasi esok hari tanggal 16 Juli 2021," jelas Dirjen Budi.



Serbuan Vaksinasi Covid-19 Ship to Ship TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Perhubungan, PT. ASDP Indonesia Ferry, dan KKP II Banten, di Pelabuhan Merak, 27/7/2021. Foto: HMS DJPD/WBW



Seorang pelajar SMP mendapatkan suntikan vaksin Sinovac di lengannya pada saat kegiatan vaksinasi massal di SMPN 1 Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur (22/8/2021). Foto: HMS DJPD/CAS

Kemenhub dan TNI AL Selenggarakan Vaksinasi di Simpul-Simpul Transportasi

Kementerian Perhubungan dan TNI AL melaksanakan vaksinasi Covid-19 di simpul transportasi Pelabuhan Penyeberangan Merak, pada Selasa (27/7). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meninjau langsung program “Serbuan Vaksinasi Covid-19” yang menyediakan vaksin sekitar 1.500 vaksin, yang menasar para pekerja di pelabuhan, masyarakat di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Merak, hingga para anak buah kapal yang sedang beroperasi di tengah laut.

“Alhamdulillah kami bersama-sama TNI AL sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi di simpul-simpul transportasi. Ini adalah suatu contoh yang baik, sebagaimana

arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk menggenjatkan program vaksinasi ini,” kata Menhub.

Menhub mengapresiasi TNI AL yang telah berkolaborasi bersama Kemenhub melakukan kegiatan vaksinasi di simpul-simpul transportasi. Menhub mengatakan, tingkat partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi di kota Cilegon termasuk di Merak baru sekitar 18% dan kedepannya akan ditingkatkan menjadi paling tidak 60%. Lebih lanjut Menhub mengajak unsur TNI dan Polri, serta unsur terkait lainnya, untuk lebih intensif lagi melakukan program vaksinasi, khususnya di simpul-simpul transportasi.

“Simpul-simpul transportasi menjadi penting harus dilakukan karena merupakan area perlintasan masyarakat dari satu

tempat ke tempat yang lain. Untuk itu vaksinasi yang dilakukan di simpul transportasi dapat menjadi filter yang baik dalam rangka menggenjatkan program vaksinasi yang tengah dilakukan pemerintah,” jelas Menhub.

Kemenhub Berkolaborasi Dengan Polri Gelar Vaksinasi Di Terminal Tipe A Jatijajar Depok

Kementerian Perhubungan kembali menggelar kegiatan vaksinasi di simpul transportasi. Kali ini, Kemenhub melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berkolaborasi dengan Polri dan Pemerintah Kota Depok, dan PT Jasa Raharja menggelar program “Gerai Vaksin Merdeka” yang dilaksanakan di Terminal Tipe A Jatijajar, Depok, Rabu (11/8).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung keg-

INFO KHUSUS

iatan vaksinasi yang diperuntukan bagi masyarakat Depok dan sekitarnya. Ditargetkan, kegiatan vaksinasi dapat dilakukan kepada 1.000 orang dengan usia 18 tahun ke atas.

“Sebagaimana perintah Bapak Presiden bahwa Kementerian dan Lembaga harus ikut melakukan intensifikasi vaksinasi. Dan alhamdulillah, Kemenhub sudah melaksanakan program vaksinasi bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Pemda. Hingga hari ini, secara total kami telah melakukan vaksinasi sekitar 200 ribu orang,” jelas Menhub.

Menhub menjelaskan, jumlah masyarakat yang vaksin di kota penyangga Jakarta harus ditingkatkan. Saat ini di Jakarta sudah mencapai 80 persen dan di Kota Depok baru sekitar 27 persen.

“Tiap minggu kami lakukan vaksinasi di simpul-simpul transportasi dan juga sekolah-sekolah transportasi. Terima kasih kepada Walikota Depok karena di Kota Depok partisipasi masyarakat untuk vaksin sudah 27 persen. Terima kasih juga kepada Polri sudah berkolaborasi dengan kami menggelar vaksin di simpul-simpul transportasi,” jelas Menhub Budi.

Menhub berharap, dengan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan vaksin, diharapkan akan tercipta kekebalan komunal atau herd immunity terhadap virus Covid-19. Menhub berharap, upaya ini dapat segera memulihkan dan menggerakkan kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat akan kembali normal.

KEMENHUB- TNI AL GELAR SERBUAN VAKSINASI DI PELABUHAN KETAPANG

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kembali melakukan serbuan vaksinasi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi bekerjasama dengan TNI AL. “Hari

ini pak Menhub memerintahkan kepada saya untuk vaksinasi bekerjasama dengan TNI AL, yang pertama dilaksanakan di Merak, kali ini di Banyuwangi,” demikian dijelaskan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi pada Kamis (12/8).

Dirjen Budi menjelaskan bahwa kegiatan serbuan vaksinasi ini diinisiasi Menteri Perhubungan bersama dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut untuk membantu vaksinasi masyarakat maritim. Sebelum di Banyuwangi, acara serupa juga telah digelar di Pelabuhan Merak pada 27 Juli lalu.

“Jadi sasarannya adalah masyarakat di sekitar laut, tempatnya ada 4 dermaga; Ketapang, Gilimanuk, Merak, dan Bakauheni. Hari ini ada sekitar 1.500 dosis vaksin yang diberikan jadi mudah-mudahan kerjasama ini dapat meningkatkan herd immunity masyarakat,” kata Dirjen Budi.

Selain TNI AL, serbuan vaksinasi di Pelabuhan Ketapang ini juga didukung Pelindo 3 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan PT. Jasa Raharja. Dirjen Budi berharap jika kegiatan serbuan vaksinasi yang dilakukan di berbagai daerah tersebut dapat membantu memutus rantai penularan Covid-19 dalam rangka menghentikan wabah serta dalam jangka panjang.

“Kegiatan serbuan vaksinasi Covid-19 di Banyuwangi dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan jumlah penerima vaksin yang semakin besar agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Banyuwangi mengingat Banyuwangi adalah salah satu destinasi wisata yang potensial dan juga tempat transit menuju lokasi wisata lainnya seperti Bali, Lombok dan sekitarnya. Mudah-mudahan dapat membantu masyarakat pesisir,” ucap Dirjen Budi.



Kemenhub Bersama Setneg dan Kementerian BUMN Sukseskan Kegiatan Vaksinasi Massal di Bojonegoro

Kementerian Perhubungan turut mendukung suksesnya kegiatan vaksinasi massal nasional. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Mensesneg Pratikno dan Menteri BUMN Erick Thohir meninjau salah satu program Vaksinasi “Bakti Untuk Negeri” di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang berlangsung di di SMP 1 Padangan, Minggu (22/8).

Program ini merupakan hasil kolaborasi dari Kementerian BUMN, Kemenhub, Sekretariat Negara (Setneg), TNI/POLRI, dan Pemkab Bojonegoro. Untuk kegiatan vaksinasi di SMP 1 Padangan, dilaksanakan selama satu hari yaitu pada hari Minggu, 22 Agustus 2021. Dimana tersedia sebanyak 500 vaksin yang menyasar kalangan pelajar (300 siswa SMP), pekerja transportasi (150 orang) dan masyarakat umum (50 orang).



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyapa peserta vaksinasi massal di Kantor Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, 28/8/2021. Foto: HMS DJPD/BYU

Menhub mengatakan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, seluruh Kementerian/Lembaga harus turut mendukung upaya percepatan vaksinasi nasional.

“Hari ini kegiatan vaksinasinya luar biasa. Jumlah vaksinnnya banyak dan dikelola dengan baik dan kompak antar Kementerian dan Lembaga. Arahan bapak Presiden bahwa semua pihak harus melakukan kegiatan vaksinasi secara serius. Ini bisa menjadi contoh yang baik di daerah-daerah lainnya,” jelas Menhub.

Kegiatan vaksinasi di Bojonegoro secara total menyediakan sebanyak 22.590 vaksin yang diselenggarakan serentak di berbagai tempat yaitu: SMP 1 Padangan, GOR Dolokgede, 36 Puskesmas dan 8 Jajaran Polres Bojonegoro.

Dukungan Kemenhub yaitu membantu menyediakan tenaga

kesehatan (nakes) bersama dengan Pemkab Bojonegoro, TNI, dan Polri. Dengan total nakes sebanyak 250 orang.

Sementara itu, Mensesneg Pratikno mengatakan, pemerintah saat ini terus mempercepat vaksinasi di seluruh pelosok Indonesia tentunya dengan dukungan semua pihak agar program vaksinasi dapat dilaksanakan dengan baik. Menurutnya hal ini butuh dukungan dari semua pihak, dalam upaya bersama mengendalikan pandemi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pasokan oksigen di Jawa Timur sudah mencukupi, karena PT. Petrokimia Gresik sudah melakukan produksi oksigen 23 Ton/hari. Begitupun juga dengan obat-obatan sudah tersedia di puskesmas-puskesmas.

Dalam kunjungannya, Menhub juga meninjau kegiatan vaksinasi

di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, Cepu, Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh Pemkab Blora bekerja sama dengan TNI/Polri.

Selain meninjau kegiatan vaksinasi, juga dilakukan kegiatan pembagian bantuan 1.000 sembako, 10.000 masker dan helm, serta buah lokal dalam rangka Gerakan Buah Nusantara, kepada tenaga pendidik dan masyarakat sekitar.

Sasar Pengemudi Ojol dan Truk, Kemenhub Gelar Vaksinasi di Makassar

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan kali ini kembali menggelar kegiatan serbuan vaksinasi bagi pengemudi transportasi online, pengemudi truk, dan masyarakat umum sekaligus pemberian bantuan sosial di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Rangkaian kegiatan ini diadakan pada Rabu (25/8) hasil kerjasama antara Kementerian Perhubungan dengan PT. Pelindo IV.

“Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak yang terlibat baik Pelindo IV maupun pemerintah daerah. Jadi pemerintah sampai dengan Agustus ingin mengejar target percepatan vaksinasi di seluruh wilayah. Untuk di Sulawesi Selatan baru mencapai 27%, mudah-mudahan sampai akhir bulan Agustus bisa mencapai 40%. Hingga saat ini memang yang menjadi masalah utama adalah ketersediaan vaksin. Oleh karena itu, kami jika melaksanakan vaksinasi juga bekerjasama dengan TNI AL, Kodam, dan Polda,” demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi saat pembukaan kegiatan tersebut berlangsung.

Melalui kegiatan vaksinasi massal ini, ditargetkan sebanyak 339 orang akan divaksinasi. Selain itu juga dibagikan sebanyak 300

INFO KHUSUS

paket bantuan sembako khusus bagi pengemudi ojek online yang terdampak pandemi Covid-19.

Pemerintah mengupayakan pencegahan penularan Covid-19 ini dengan menyusun sebuah regulasi bertransportasi dalam masa pandemi yang menyebabkan adanya pembatasan terhadap kapasitas jumlah penumpang yang ada. Pengemudi dan seluruh awak kendaraan merupakan bagian dari garda terdepan dalam melayani pergerakan masyarakat sehingga beberapa pengemudi khususnya ojek online secara tidak langsung terdampak operasionalnya selama masa pandemi ini.

“Apa yang dilaksanakan pemerintah ini saya kira harus didukung. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat bagi masyarakat untuk mendorong agar banyak masyarakat yang mau divaksinasi. Saya harapkan bantuan CSR dari Pelindo IV ini kepada masyarakat terutama mitra transportasi darat akan bermanfaat bagi masyarakat kita dan meringankan beban mereka selama pandemi,” kata Dirjen Budi.

Dirjen Budi juga menyampaikan dengan adanya kegiatan pemberian vaksin ini adalah bukti pencapaian bersama dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat yang maksimal di tengah pandemi Covid - 19 khususnya bagi mitra transportasi online dan pengemudi truk.

Kemenhub Dukung Kegiatan Vaksinasi Massal di Purworejo

Kementerian Perhubungan turut mendukung kegiatan vaksinasi massal yang berlangsung di Kabupaten Purworejo. Kemenhub berkolaborasi dengan sejumlah pihak yakni TNI (Kodam IV Diponegoro), Polri (Polres Purworejo), Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Purworejo,

Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi bersama Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti; Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono; Kapolresta Banyumas Kombes. Pol. M. Firman L. Hakim, Ketua DPRD Banyumas Budhi Setiawan dan pejabat terkait lainnya dalam kegiatan vaksinasi Bakti untuk Negeri di Banyumas, Jawa Tengah, 4/9/2021.
Foto: HMS DJPD/BYU



dan BUMN menyelenggarakan kegiatan Vaksinasi “Bakti Untuk Negeri” yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Sabtu (28/8).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung lokasi kegiatan vaksinasi massal yang diperuntukan bagi masyarakat umum, pekerja transportasi, dan pelajar di Kabupaten Purworejo, dengan target 3000 dosis vaksin. Kegiatan vaksinasi massal di Purworejo tersebar di beberapa lokasi lainnya yaitu di 10 Puskesmas Kab. Purworejo, Kodim 0708 Purworejo, dan sekolah.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa Kementerian dan Lembaga harus ikut mengawal kegiatan vaksinasi massal. Dari dukungan kami terhadap kegiatan vaksinasi massal di sejumlah daerah, hingga hari ini sudah lebih dari 250 ribu masyarakat yang

divaksin. Dengan adanya kegiatan vaksinasi di Purworejo diharapkan semakin meningkatkan jangkauan vaksinasi di Purworejo menuju kekebalan komunal,” jelas Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, dengan telah dilakukan soft opening Kereta Bandara Yogyakarta International Airport YIA dengan waktu tempuh 40 menit menuju kota Yogyakarta maka diharapkan Kabupaten dan Purworejo sebagai daerah terdekat dari Bandara memperoleh manfaat dari kehadiran KA Bandara tersebut. Menhub menilai Kabupaten Purworejo memiliki banyak potensi untuk terus dikembangkan.

“Dengan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan vaksin, diharapkan akan tercipta kekebalan komunal atau herd immunity terhadap virus Covid-19.



PENGENDALIAN TRANSPORTASI PENIADAAN MUDIK

di Purwokerto ini diharapkan semakin meningkatkan jangkauan vaksinasi di Kabupaten Banyumas menuju kekebalan komunal,” jelas Dirjen Budi.

Lebih lanjut Dirjen Budi mengungkapkan, pihaknya telah mendukung kegiatan vaksinasi massal di beberapa lokasi, antara lain di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Terminal Jatijajar Depok, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Bojonegoro, Purworejo, dan Banyumas.

“Dengan semakin banyaknya masyarakat yang mendapatkan vaksin, diharapkan akan tercipta kekebalan komunal atau herd immunity terhadap virus Covid-19. Yang diharapkan dapat segera memulihkan dan menggerakkan putaran roda ekonomi dan aktivitas masyarakat,” jelas Dirjen Budi.

Dengan menggandeng pihak-pihak terkait dan bersinergi dengan berbagai instansi, Kementerian Perhubungan turut mendukung percepatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Yang diharapkan dapat segera memulihkan dan menggerakkan kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat akan kembali normal menuju Indonesia Maju,” jelas Menhub.

Kemenhub Dukung Kegiatan Vaksinasi Massal di Kabupaten Banyumas

Kementerian Perhubungan turut mendukung kegiatan vaksinasi massal yang berlangsung di Kabupaten Banyumas. Kemenhub berkolaborasi dengan sejumlah pihak yakni Polri (Biddokkes Polda Jateng), TNI (Kodim 0701 Banyumas), Pemkab Banyumas, dan PT. Jasa Raharja menyelenggarakan kegiatan Vaksinasi “Bakti Untuk Negeri” yang dilaksanakan di Terminal Tipe A Bulupitu, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (4/9).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi

meninjau langsung lokasi kegiatan vaksinasi massal yang diperuntukan bagi masyarakat umum, komunitas pekerja transportasi, dan pelajar di Kabupaten Banyumas, dengan target 3.000 dosis vaksin. Kegiatan vaksinasi massal di Banyumas juga tersebar di beberapa lokasi lainnya yaitu di 15 Puskesmas Kab. Banyumas.

“Apa yang sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa Kementerian dan Lembaga harus turut membantu percepatan kegiatan vaksinasi kepada masyarakat. Dari dukungan kami terhadap kegiatan vaksinasi massal di sejumlah daerah, hingga hari ini sudah lebih dari 250 ribu masyarakat yang telah divaksin. Dengan adanya kegiatan vaksinasi

Pada kesempatan tersebut, hadir pula Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti; Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono; Kapolresta Banyumas Kombes. Pol. M. Firman L. Hakim, Ketua DPRD Banyumas Budhi

Setiawan, dan turut menyapa sejumlah lokasi vaksinasi di Kabupaten Banyumas melalui video conference.

Selain kegiatan vaksinasi, Kemenhub bersama stakeholder Jasa Raharja memberikan paket sembako bantuan “Bakti Untuk Negeri” kepada perwakilan masyarakat penerima vaksin, pengemudi ojek online, supir angkot, dan pedagang. Selain itu, Kemenhub memberikan helm secara simbolis kepada perwakilan masyarakat dan komunitas pekerja transportasi.(*)

DUKUNGAN KEMENHUB UNTUK PON XX PAPUA



Dalam rangka mendukung kesuksesan pelaksanaan PON XX dan PEPARNAS XVI Papua, Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memberikan dukungan antara lain berupa penyediaan 428 bus untuk transportasi atlet dan *official* selama pelaksanaan PON XX Papua.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi melakukan peninjauan dukungan PON XX dan PEPARNAS XVI PAPUA berupa kesiapan kapal yang akan mengangkut bus bantuan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Rabu (11/8). Rencananya Ditjen Hubdat akan memberikan dukungan salah satunya berupa bus dan pengemudi sebanyak 428 bus dan 472 awak bus. 428 unit bus tersebut terdiri dari 217 unit bus *micro 19 seat* merupakan pengadaan dan 211 unit bus medium *26 seat* yang akan disewa.

“Untuk skema pemberangkatan bus akan kita kirim masing-masing dari Tanjung Priok menuju Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke dengan menggunakan KM. Dharma Kencana VII dan KM. Dharma Rucitra VII,” jelas Dirjen Budi.

Seluruh bus tersebut ditargetkan tiba di masing-masing lokasi paling lambat 1 September 2021. Pola operasi bus saat pelaksanaan PON XX yaitu bus akan melekat kepada atlet dan *official* dengan sistem *shuttle*.

“Selain itu untuk memberdayakan masyarakat lokal, maka rekrutmen 261 pengemudi bus pengadaan berasal dari penduduk Provinsi Papua. Pengemudi yang direkrut akan diberikan pelatihan keterampilan mengemudi dan *hospitality* dalam pelayanan. Sementara pengemudi bus sewa berasal dari perusahaan bus yang disewa,” ujar Dirjen Budi.

Sementara untuk dukungan PEPARNAS XVI, Ditjen Hubdat akan menyiapkan sebanyak 120 unit bus mikro pengadaan (eks bus PON XX). “Namun sesuai saran dari Pemerintah Provinsi Papua kita akan melakukan modifikasi interior bagi 60 unit bus dengan membuat ramp on/off sesuai standar kemiringan bagi atlet pengguna kursi roda, sementara 60 unit lainnya tanpa modifikasi,” kata Dirjen Budi.

Menteri Perhubungan Lepas Keberangkatan Bus Bantuan ke Papua

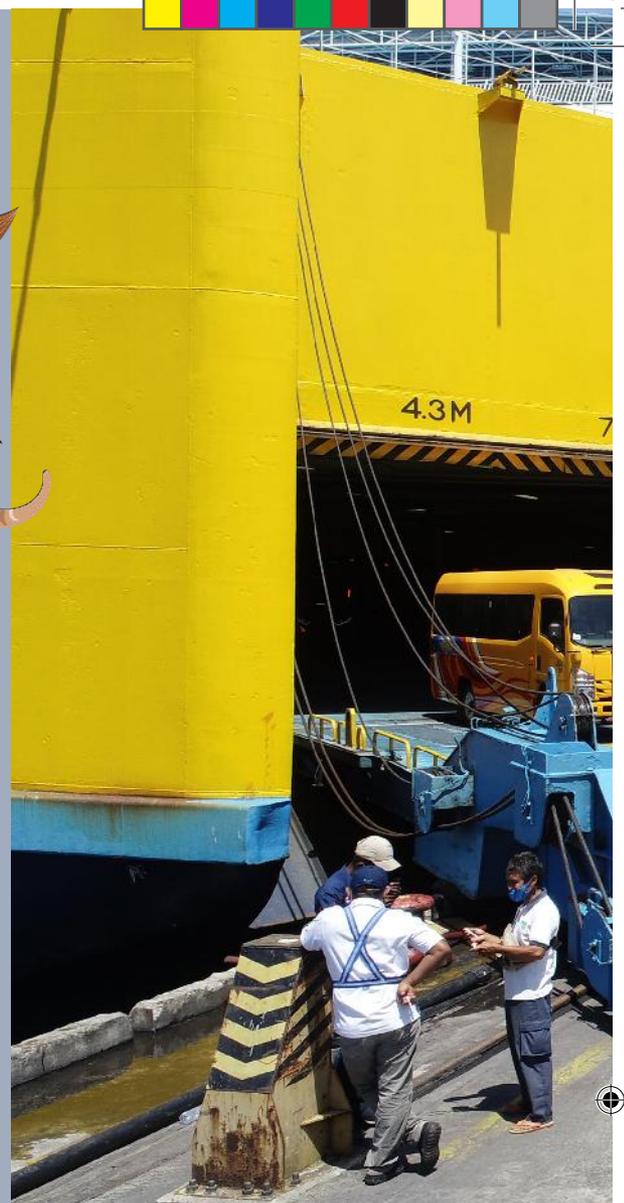
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melepas keberangkatan kapal KM Dharma Kencana VII dari Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (24/8) petang. Kapal tersebut mengangkut sebanyak 316 bus dengan tujuan Pelabuhan

Jayapura dan direncanakan akan tiba pada awal September 2021.

Sebelumnya, pada Sabtu (21/8) lalu, sudah diberangkatkan sebanyak 112 bus dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju ke Timika dan Merauke, menggunakan kapal KM Dharma Rucitra I, yang akan tiba di Timika pada Sabtu (28/8), dan tiba di Merauke pada Selasa (31/8).

“Bus-bus ini akan mendukung pergerakan transportasi para atlet dan tim *official* di tiga tempat yaitu di Jayapura, Timika, dan Merauke,” jelas Menhub.

Menhub menjelaskan, selain mengirim bus, Kemenhub juga menyediakan sebanyak 515 awak bus. Sebanyak 261 dari 515 orang tersebut merupakan pengemudi





Bus *micro* bantuan dari Kementerian Perhubungan tiba di Jayapura, Papua, 3/9/2021. Kementerian Perhubungan memberikan dukungan berupa bantuan 428 bus untuk penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI Papua. Foto: HMS DJPD/WBW

yang direkrut dari penduduk Provinsi Papua sebagai wujud pemberdayaan masyarakat asli Provinsi Papua.

Selain untuk mendukung pelaksanaan PON, Bus dan awak bus yang disediakan Kemenhub juga akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI di Papua, yang diselenggarakan sesudah PON. Sebanyak 160 unit bus tersebut akan dilakukan modifikasi dengan membuat ramp on/off dengan kemiringan yang sesuai, untuk digunakan para atlet Peparnas yang menggunakan kursi roda.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, setelah pelaksanaan PON dan Peparnas di Papua, sebagian bus tersebut akan dimanfaatkan

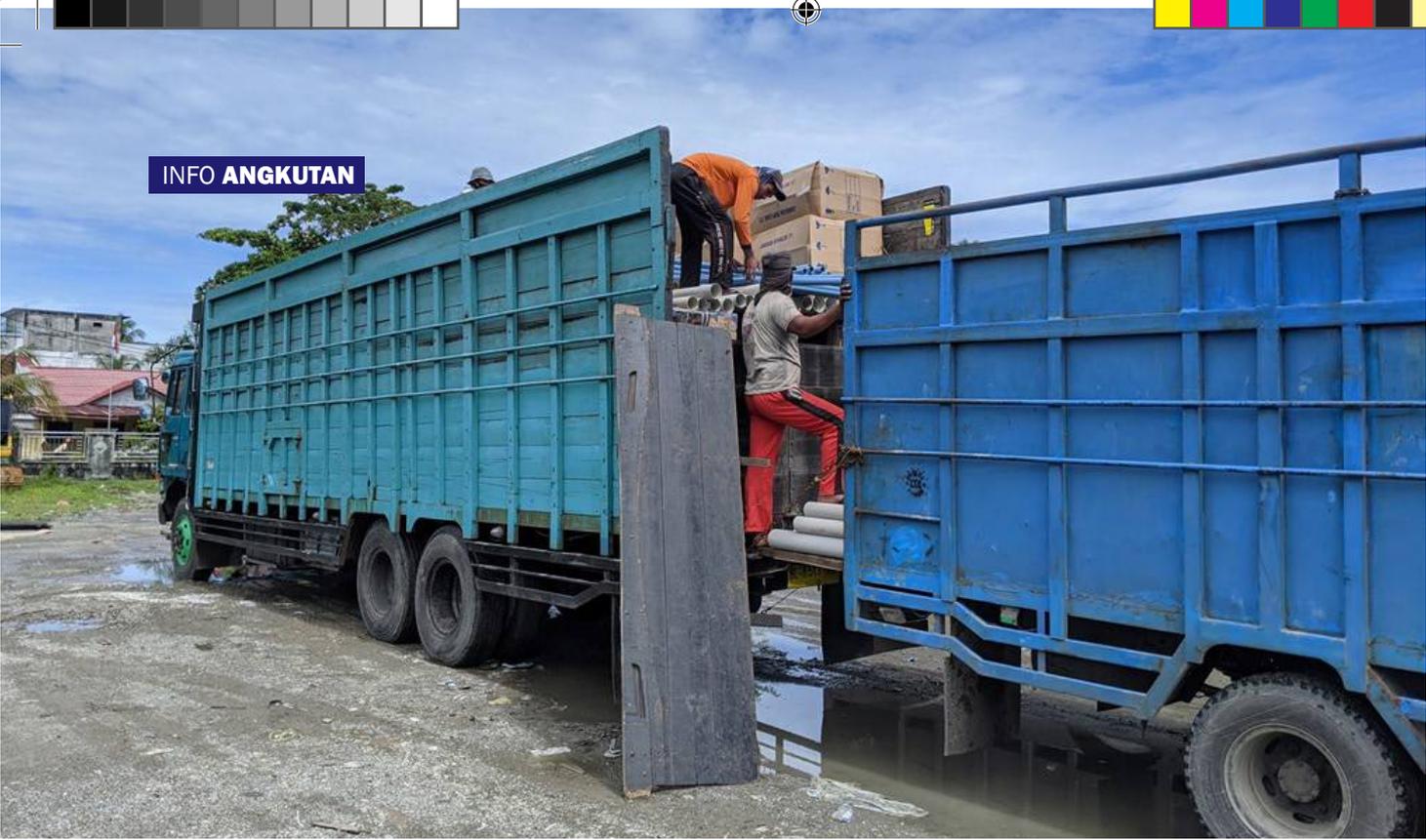
untuk melayani angkutan perintis, perkotaan, yang pengelolaannya diserahkan ke DAMRI.

“DAMRI di Papua itu punya fungsi dua bukan hanya angkutan orang saja tetapi juga orang-orang Papua membawa barang pake DAMRI untuk di bawa ke pasar, jadi fungsi ekonomi dari DAMRI di Papua itu sangat tinggi,” jelas Menhub Budi.

Selain itu, sejumlah dukungan yang diberikan Kemenhub untuk penyelenggaraan PON dan Perpanas di Papua yaitu: Pembangunan dermaga dan 2 unit bus air yang akan dioperasikan di Danau Sentani, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, pembangunan Terminal Tipe A Entrop Kota Jayapura, dan pembangunan Area *Traffic Control System* (ATCS) di Kota Jayapura.

Turut hadir dalam acara pelepasan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, dan Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo. (*)





Kendaraan angkutan barang sedang melakukan bongkar muat memindahkan logistik ke truk kecil untuk kebutuhan daerah sekitar. Angkutan barang yang berhenti di terminal barang Meulaboh ini berasal dari Medan, Sumatera Utara (4/11/2020). Foto: Dishub Prov. Aceh

Peran Penting Transportasi Dalam Sistem Logistik

Sektor transportasi mempunyai peran penting dalam sistem logistik di dalam alur pergerakan barang dan konektivitas antar wilayah. Saat ini transportasi angkutan barang menggunakan moda angkutan jalan masih menjadi yang paling dominan dalam sistem logistik di Indonesia.

Guna menambah pemahaman dan pengetahuan bagi Unit Pelaksana Teknis di daerah terhadap kebijakan Pemerintah terkait penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan, maupun penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dan penyelenggaraan

bidang lalu lintas angkutan jalan, maka Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Bidang Angkutan Barang di Jalan Tahap I Tahun 2021 dalam format webinar.

Dalam sosialisasi yang digelar pada Kamis (19/8) Direktur

Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyampaikan bahwa angkutan barang adalah hal yang penting dalam sektor transportasi. “Sektor transportasi mempunyai peran penting dalam sistem logistik di dalam alur pergerakan barang dan konektivitas antar wilayah. Saat ini transportasi angkutan barang menggunakan moda angkutan jalan masih menjadi yang paling dominan dalam sistem logistik di Indonesia. Dari beberapa data yang ada kita melihat peran logistik untuk di jalan raya mencapai 80-90% sisanya mungkin menggunakan moda transportasi lain. Kita melihat saat pandemi sekarang, Pemerintah berhati-hati saat membuat kebijakan pembatasan pergerakan mobilisasi masyarakat dan angkutan barang dikecualikan jadi sangat prioritas bagi kita semua,” kata Dirjen Budi.

Menurutnya, penggunaan moda angkutan barang di jalan yang cukup tinggi sehingga dibutuhkan kebijakan guna mewujudkan penyelenggaraan angkutan barang di jalan yang aman, selamat, lancar, dan tertib. “Peran Pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat menghasilkan kebijakan penyelenggaraan



angkutan barang yang memprioritaskan pada aspek keselamatan namun juga tidak mengesampingkan peningkatan pelayanan jasa angkutan barang. Meningkatnya kebutuhan barang seiring pertumbuhan jumlah penduduk serta bertambahnya jumlah kawasan industri di Indonesia menjadi latar belakang perlunya suatu kebijakan pada bidang transportasi sebagai perangkat hukum yang menjadi dasar aturan angkutan barang di jalan,” jelas Dirjen Budi.

Hingga saat ini salah satu permasalahan pada penyelenggaraan jasa angkutan barang adalah masih banyaknya praktek pengangkutan angkutan barang dengan angkutan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) yang memberi dampak terhadap kondisi lalu lintas seperti kerusakan jalan dan menurunnya keselamatan lalu lintas sehingga memicu potensi kecelakaan di jalan. “Fungsi pengawasan terhadap pelanggaran angkutan barang di jalan perlu kembali dipertegas baik oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan di daerah agar operator jasa angkutan barang patuh terhadap aturan yang berlaku. Saat ini kami tengah membangun sistem melalui teknologi informasi berbasis aplikasi berupa data jenis angkutan barang, komoditi yang diangkut juga alur pergerakannya melalui GPS yang nantinya data tersebut terangkum dalam database manifest elektronik. Aplikasi ini nantinya akan terintegrasi dengan aplikasi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan dapat diakses agar mempermudah fungsi pengawasan angkutan barang secara lebih menyeluruh,” jelas Dirjen Budi.

Sementara itu, Pemerintah telah mendorong terciptanya kemudahan berusaha dengan disahkannya UU Cipta Kerja yang



Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Bidang Angkutan Barang di Jalan Tahap I Tahun 2021 diadakan dalam format webinar (19/8/2021).

bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam kegiatan sosialisasi ini disampaikan juga paparan mengenai Tindakan Lanjut Kebijakan PP 5 Tahun 2021 Terhadap Angkutan Barang di Jalan (Angkutan Barang Umum dan Khusus) oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Lukijanto. Ia menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia mulai memainkan peranan penting termasuk di sektor transportasi.

“Di dalam penerapan UU Cipta Kerja ini kita harapkan bahwa ekonomi akan tumbuh sehingga dalam rangka menciptakan daya saing maka Pemerintah melakukan reformasi perizinan. Sebagai turunan dari UU nomor 11 tahun 2020 diterbitkan PP 5/2021 yang di dalamnya memuat kebijakan Pemerintah terhadap angkutan barang di jalan terkait angkutan bermotor untuk barang khusus dengan tingkat resiko tinggi, karena barang khusus terdiri dari barang berbahaya dan barang tidak berbahaya. Dengan demikian penyempurnaan aturan di bidang angkutan barang ini akan lebih menjamin angkutan yang selamat, aman, dan nyaman serta selaras dengan peraturan yang ada,” jelas Lukijanto.

Selain itu hadir juga sebagai pembicara lainnya antara lain Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Prabawa Eka Soesanta yang menyampaikan materi seputar Tindakan Lanjut PP nomor 5 Tahun 2021 (Delegasi Perizinan Angkutan Barang Umum terhadap Gubernur), Kasubdit Angkutan Barang Alexander Hilmi Perdana dengan materi Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, serta Plt. Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Endy Irawan dengan materi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam laporannya di acara ini, Direktur Angkutan Jalan Ahmad Yani menjelaskan bahwa peserta yang hadir dalam acara ini merupakan perwakilan Dinas Perhubungan yang ada di seluruh Pulau Sumatera, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur serta Balai Pengelola Transportasi Darat. “Diharapkan dari sosialisasi ini dapat mendorong kualitas pelayanan publik yang baik bagi SDM Perhubungan Darat yang mampu menularkan semangat profesionalitasnya di wilayah kerjanya masing-masing,” pungkas Yani.(*)



INFO ANGKUTAN

Kementerian Perhubungan mendorong perusahaan angkutan barang untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Barang. Langkah ini sebagai salah satu upaya, untuk menyelesaikan permasalahan aspek keselamatan dari angkutan barang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan hal tersebut, ketika membuka Webinar Keselamatan Transportasi bertema “Meningkatkan Keselamatan Angkutan Barang di Jalan” Kamis (23/9), sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Harhubnas 2021.

“Salah satu masalah yang dihadapi oleh penyelenggara angkutan barang adalah kendaraan yang overdimensi dan overload atau ODOL. Saat ini kami sedang mendorong penerapan sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Barang, dimana setiap perusahaan angkutan wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan,” jelas Menhub.

Menhub mengungkapkan, hingga saat ini, angkutan barang melalui jalur darat masih mendominasi dalam sistem logistik, dengan porsi peran mencapai 90% dari total moda transportasi yang lain. Sehingga, dibutuhkan kebijakan yang tepat guna mewujudkan penyelenggaraan angkutan barang di jalan yang aman, selamat, lancar, dan tertib.

“Sejumlah kebijakan telah kami lakukan misalnya dengan penegakan hukum seperti transfer muatan, tilang elektronik, normalisasi kendaraan dan penindakan penyidikan, dalam rangka mencapai target program zero ODOL di tahun 2023,” ujar Menhub.



MENINGKATKAN KESELAMATAN ANGKUTAN BARANG

Salah satu masalah yang dihadapi oleh penyelenggara angkutan barang adalah kendaraan yang *overdimension* dan *overload* atau ODOL. Saat ini Kementerian Perhubungan sedang mendorong penerapan sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Barang, di mana setiap perusahaan angkutan wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan.



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan *keynote speech* pada Webinar “Meningkatkan Keselamatan Angkutan Barang di Jalan”

Webinar Keselamatan Transportasi bertema “Meningkatkan Keselamatan Angkutan Barang di Jalan” Kamis (23/9/2021), dilaksanakan secara hybrid. Foto: HMS DJPD/BYU

Menhub menjelaskan, dalam merumuskan kebijakan yang tepat tersebut diperlukan keterlibatan para pemangku kepentingan lainnya, mulai dari Kementerian/ Lembaga terkait, perusahaan angkutan barang, organisasi/ asosiasi angkutan barang, dan masyarakat.

“Momentum Harhubnas ini, merupakan waktu yang tepat bagi para insan transportasi menunjukkan kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan. Untuk membuat suatu perubahan dan mencari terobosan dalam mengatasi berbagai permasalahan di sektor transportasi, termasuk angkutan barang,” ungkap Menhub.

Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat telah menargetkan terwujudnya Zero

ODOL pada Tahun 2023. Yang bertujuan antara lain untuk: menurunkan angka kecelakaan yang melibatkan angkutan barang, mempertahankan umur jalan dan menghindari kerusakan dini jalan, serta menciptakan biaya operasional yang lebih rendah.

Untuk mewujudkan target tersebut, telah dilakukan dan dikembangkan sejumlah kebijakan dan program dalam upaya mengatasi permasalahan keselamatan angkutan barang. Di antaranya: pengembangan aplikasi E-manifest yang dapat mengetahui pola pergerakan angkutan barang berbasis aplikasi; pengembangan aplikasi E-logbook yang dapat mengetahui unjuk kerja pengemudi seperti misalnya: waktu kerja, waktu istirahat,

dan penggantian pengemudi; penerapan *Global Positioning System* (GPS) untuk mengetahui perilaku pengemudi, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan meningkatkan kepuasan pelanggan; Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu standar pencapaian kinerja angkutan barang (kompetensi pengemudi, kelengkapan fasilitas kendaraan, tarif angkutan barang, pembatasan umur kendaraan, dan lain sebagainya); program pelatihan bagi awak kendaraan barang khusus (angkutan barang berbahaya).



Kombes Pol. Abrianto Pardede, S.H., S.I.K. dari Korlantas Polri menjadi narasumber Webinar Meningkatkan Keselamatan Angkutan Barang di Jalan, 23/9/2021.

Turut hadir dalam webinar ini Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Kombes Pol. Abrianto Pardede dari Korlantas Polri, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Sigit Puji Santosa, Ketua Umum Aprindo Gemilang Tarigan dan Ogik Giarno dari PT 3M.(*)

INFO ANGKUTAN

Kali ini program layanan *Buy The Service* (BTS) Teman Bus kembali menambah layanan terbarunya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Layanan BTS di Makassar akan tersedia sebanyak 87 unit bus yang akan melayani penumpang di 4 (empat) rute layanan dengan 261 titik halte atau bus stop. Layanan baru untuk Kota Makassar ini dibahas dalam webinar bertajuk “Program Teman Bus untuk Konektivitas Kawasan Perkotaan di Makassar” yang digelar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Jumat (20/8).

“Transportasi umum yang sedang kami bangun totalnya menjadi 10 kota besar per tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi backbone transportasi perkotaan. Kita harapkan angkutan massal perkotaan nantinya sebagai angkutan utama atau prioritas sehingga dari Pemerintah Daerah dapat diberlakukan sejumlah kebijakan setempat untuk mendorong masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi pada paparannya dalam webinar tersebut.

Keempat rute layanan BTS di Makassar yaitu:

1. Terminal Mallengkeri - UNHAS (melalui Jl. Metro Tj. Bunga),
2. Mall Panakkukang - Bandara Sultan Hasanuddin,
3. Kampus 2 PNUP - Kampus 2 PIP,
4. Pelabuhan Soekarno Hatta - UIN Samata.

“Dalam UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 158 dituliskan bahwa Pemerintah baik pusat maupun daerah menjamin ketersediaan angkutan massal. Jadi pemerintah harus menyiapkan angkutan massal dengan kondisi yang terkini sehingga bus yang akan melayani masyarakat adalah bus yang



Layanan baru untuk Kota Makassar ini dibahas dalam webinar bertajuk “Program Teman Bus untuk Konektivitas Kawasan Perkotaan di Makassar” yang digelar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Jumat (20/8/2021).

TEMAN BUS SIAP LAYANI MASYARAKAT MAKASSAR

Bus yang disiapkan adalah *low deck*, berukuran sedang. Layanan Teman Bus ini juga sudah dilengkapi dengan aplikasi Teman Bus 2.0 untuk penumpang sehingga diketahui posisi bus sudah dimana.

nyaman, bersih, aman, murah, dan menarik secara visual,” tambah Dirjen Budi.

Lebih lanjut lagi, Dirjen Budi menyatakan bahwa baik dari sisi penumpang maupun pengemudi akan mendapatkan jaminan kepastian. “Selain itu mengenai kepastian tidak hanya faktor keselamatan bagi penumpang yang dijamin namun menyangkut angkutan umum ini maka pengemudinya juga mendapatkan jaminan kepastian mengenai pendapatannya sehingga tetap ada gaji sesuai standar yang ditetapkan, tidak berdasarkan sepi atau ramainya

penumpang, namun dengan catatan selama mengemudi tidak ada pelanggaran. Pengemudi juga akan mendapat perlindungan jaminan pekerja dengan BPJS.”

Sementara itu dalam hal teknis operasionalnya, Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani turut memaparkan detail operasional layanan Teman Bus di Makassar. “Bus yang kita siapkan adalah *low deck*, dengan bus ukuran sedang. Layanan Teman Bus ini juga sudah dilengkapi dengan aplikasi Teman Bus 2.0 untuk penumpang sehingga diketahui posisi bus sudah dimana,” tambah Yani.



Webinar bertajuk “Program Teman Bus untuk Konektivitas Kawasan Perkotaan di Makassar” yang digelar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Jumat (20/8/2021).

Yani menjelaskan bahwa dalam penggunaannya nanti, sama seperti di kota-kota sebelumnya, layanan BTS di Makassar akan menerapkan standar dan indikator dalam operasionalnya, mulai dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) hingga standar kendaraan yang harus selalu dalam kondisi prima.

“Yang paling penting ukuran keberhasilan layanan angkutan perkotaan ini yang pertama *headway* 10-15 menit. Kemudian *load factor* kita bisa menghitung jumlah penumpang naik dan turun dengan alat yang tersedia di bus jadi dapat diketahui *demand*-nya berapa. Indikator selanjutnya tingkat kecelakaan saat operasional akan dimonitoring secara langsung, termasuk kecepatan angkutan umum ini kalau melanggar akan didenda,” kata Ahmad Yani.

Selaku perwakilan Pemerintah juga hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani dengan Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. Keduanya menyambut baik sekaligus berbangga atas layanan BTS Teman Bus yang akan melayani masyarakat Makassar. “Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas webinar ini semoga kita dapat menemukan solusi untuk memberikan pelayanan massal angkutan perkotaan yang lebih mudah, ekonomis, nyaman bagi masyarakat khususnya bagi Makassar,” kata Abdul Hayat Gani.

Sementara itu, hadir juga pengamat transportasi, Djoko Setijowarno yang mengungkapkan bahwa ada banyak hal untuk membuat

transportasi umum mulai dari masalah eksternal, kelembagaan, hingga pendukung *feeder* transportasi. “Untuk kota Makassar angkutan umum yang sering digunakan adalah pete-pete dengan 15 rute utama. Memang ada banyak masalah termasuk halte, sehingga membuat rute (di Makassar) itu tidak mudah. Teman-teman

Organda juga turut terlibat dan duduk bersama sehingga jangan sampai nanti ketika beroperasi Teman Bus terjadi gesekan. Secara teknis mudah dilakukan tetapi kendala sosial ini yang sulit,” jelas Djoko.

Dari sisi Pemerintah Daerah, Djoko juga menyarankan agar operasional Teman Bus di Makassar berjalan lancar dapat melakukan sejumlah hal seperti mempersiapkan halte bus, sosialisasi atau kampanye penggunaan angkutan umum, studi kemanfaatan program, dan kebijakan untuk memprioritaskan angkutan umum dibandingkan angkutan pribadi.(*)

BTS Makassar Project Profile

| | |
|-------------------------|---|
| Jumlah Koridor | 4 Koridor |
| Halte / Bus Stop | 261 Titik |
| Jenis Layanan | Koridor Utama |
| Area Coverage | Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Gowa |
| Hub Utama | Terminal Mallengkeri |
| Jumlah Bus | 87 Bus (10% bus ramah disabilitas) |
| Jenis Bus | Bus Sedang <i>High Deck Low Entry</i> (8 m) |
| Headway Layanan | 7 - 10 Menit |
| Jam Operasional | 05.00 - 22.00 WIB |



Depan



Belakang

INFO ANGKUTAN

Banjarmasin dan sekitarnya kini menjadi kota selanjutnya dalam program layanan *Buy The Service* (BTS) Teman Bus. Selain untuk mengurangi kemacetan khususnya di kawasan aglomerasi, program yang disubsidi oleh pemerintah ini juga memiliki tujuan menyejahterakan para pengemudi bus pada layanan tersebut.

“Menggunakan transportasi umum akan menjadi opsi pertama masyarakat kota yang semakin modern ini. Sistem *Buy The Service* yang dihadirkan di kota Banjarmasin juga diharapkan akan mendapatkan satu keistimewaan seperti dibuatnya jalur khusus,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dalam webinar bertajuk “Program Teman Bus Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Banjarbakula” yang digelar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Kamis (9/9).

Banjarbakula merupakan kawasan aglomerasi yang terdiri dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.

Layanan BTS di Banjarbakula akan tersedia sebanyak 77 unit bus yang akan melayani penumpang di 4 (empat) rute layanan dengan 195 titik halte atau bus stop. Keempat rute layanan BTS di Banjarbakula yaitu:

1. Terminal KM 17 – Terminal Simpang Empat,
2. Taman Siring KM 0 Banjarmasin – Terminal KM 17,
3. Terminal Handil Bakti – Terminal KM 6 – Simpang Empat Trans,
4. Terminal KM 17 Gambut Barakat – Simpang 3 Bentok.

Angkutan Massal Perkotaan merupakan *public goods*, sehingga Pemerintah menjadi penanggung risiko dalam penyediaannya. Program BTS



TEMAN BUS HADIR LAYANI MASYARAKAT BANJARMASIN

Latar belakang adanya BTS adalah sudah terlaksananya BRT Banjarbakula di Koridor I Banjarmasin – Banjarbaru, PP dan tingginya antusiasme masyarakat, sehingga dalam pengembangan ke koridor selanjutnya perlu bantuan dari Kementerian Perhubungan melalui Skema BTS (Buy The Service).

dilakukan dengan membeli layanan (memberikan subsidi 100%) dari operator dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Dalam webinar tersebut, Dirjen Budi juga menyebutkan bahwa persiapan angkutan massal dilandasi dalam UU tahun 2009 tentang LLAJ pasal 158 yakni pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan, serta Peraturan Menteri No.9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan.

Dirjen Budi menyatakan bahwa dalam program BTS ini terdapat 2 strategi yaitu *push strategy* dan *pull strategy*. “Ini dilakukan untuk mendorong masyarakat agar keluar dari zona nyaman mereka dari tidak menggunakan angkutan pribadi. Hal ini memangkas pengaturan ruang jalan, pengaturan ruang parkir, pengaturan waktu. Strategi yang kedua yaitu *pull strategy*, dilakukan untuk menarik masyarakat menggunakan bus. Dalam hal ini pemerintah harus menanggung resiko, serta pemerintah memberikan lisensi kepada operator dengan SPM dan mekanisme sanksi, dan memberikan prioritas kepada angkutan agar memiliki layanan yang terbaik,” pungkasnya.



Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani memaparkan detail operasional layanan Teman Bus di Banjarkakula. “Perubahan mindset demi meningkatkan era lama menuju era baru ini merupakan intervensi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, melihat antusiasme masyarakat yang tinggi di kota-kota sebelumnya sebanyak 6.231.839 penumpang,” tambah Yani.

Yani menjelaskan bahwa dalam penggunaannya nanti, sama seperti di kota-kota sebelumnya yaitu layanan BTS di Makassar yang menerapkan standar dan indikator dalam operasionalnya, mulai dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) hingga standar kendaraan yang harus selalu dalam kondisi prima.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Okto Risdianto Manullang, S.T., M.T., Dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro menyampaikan latar belakang hadirnya layanan bus the service melalui teman bus di Banjarkakula. Dalam paparannya Okto menjelaskan bahwa awalnya BRT Banjarkakula merupakan angkutan umum berbasis jalan yang disediakan Provinsi Kalimantan Selatan. Diresmikan pada Mei 2019, BRT Banjarkakula baru menyediakan satu koridor, yaitu rute dari KM 0 Banjarmasin sampai Banjarbaru.

Berikut adalah daftar rute BRT Banjarkakula rute Banjarmasin-Banjarbaru (PP): Gubernuran - 0 Km - RSUD Ulin - Jasa Raharja (Km 4,5) - Terminal Km 6 - Halte Universitas NU Kalsel - Halte Pasar Kindai Limpur Gambut - Halte Terminal Induk Km 17 - Halte Kota Citra Graha - Carsurin - Golf / Masjid Al Muhtadin - AIR Nav - Indomaret Bina Putra - Masjid Hj Nuriyyah - Minggu Raya - Suzuki Banjarbaru - Terminal Banjarbaru



Selain itu ada Trans Banjarmasin yang memiliki 2 koridor, dimana satu koridor dilayani oleh tiga unit bus.

1. Koridor 1 Terminal KM 6 - Terminal Antasari Terminal Km 6 menuju Pasar Antasari via Jalan Pramuka, Jalan Gatot Subroto, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Jati -Jalan Pangeran Antasari.

2. Koridor 2 Terminal Antasari - RS Anshari Shaleh Jalan Pangeran Antasari, Jalan Pangeran Samudera Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Jenderal Sudirman atau Tugu Nol Kilometer, Jalan Keramaian, Jalan Tarakan, Jalan S Parman, hingga Jalan Hasan Basri Kayu Tangi, Kampus Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam webinar tersebut, turut menyampaikan pendapat be-

berapa perwakilan pemerintah daerah di kawasan Banjarkakula yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar; Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina; Wakil Walikota Banjarbaru, Wartono, S.E.; serta Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Zulkifli Yadi Noor. Seluruhnya menyambut baik sekaligus berbangga atas adanya BTS Teman Bus yang akan melayani masyarakat Banjarkakula. (*)

BTS Banjarkakula Project Profile

| | |
|-------------------------|---|
| Jumlah Koridor | 4 Koridor |
| Halte / Bus Stop | 195 Titik |
| Jenis Layanan | Koridor Utama |
| Area Coverage | Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala |
| Hub Utama | Terminal KM. 17 |
| Jumlah Bus | 77 Bus |
| Jenis Bus | Koridor 1,2,4 Bus Sedang High Deck Low Entry (8 m) Koridor 3 Bus Mikro Low Entry |
| Headway Layanan | 7 - 10 Menit |
| Jam Operasional | 05.00 - 22.00 WITA |



MEMBERANTAS ANGGKUTAN ILEGAL

Keberadaan angkutan umum penumpang ilegal jelas sangat merugikan masyarakat baik selaku pengguna maupun pemilik perusahaan angkutan umum yang resmi.



Petugas kepolisian memeriksa barang bukti kendaraan travel gelap di Lapangan Presisi Dit Lantas PMJ, Jakarta, Kamis (29/4). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Maraknya kehadiran angkutan umum penumpang ilegal akhir-akhir ini membuat sejumlah pihak semakin terdesak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hal tersebut menjadi alasan bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Organda menggelar Webinar bertema “Penegakan Hukum Angkutan Umum Ilegal dalam Rangka Perlindungan Keselamatan Pengguna dan Keadilan Berusaha Angkutan Umum” pada Jumat (23/7).

Melalui sambutan pembukanya dalam webinar itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyatakan,

“Semakin maraknya kegiatan transportasi ilegal ini terutama pada masa Lebaran, Natal/ Tahun Baru, maupun sekarang pada masa PPKM juga bagaimana bus AKAP dan AKDP mengalami pembatasan beroperasi. Di masa Lebaran kemarin juga cukup banyak (travel gelap) yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Dengan angkutan umum yang legal sebetulnya Pemerintah sudah melakukan perhitungan berapa bangkitan penumpang dari simpul transportasi namun dengan adanya travel gelap maka merusak transportasi yang legal ini. Kalau yang legal ini selama masih pandemi kami batasi kapasitasnya 50%, namun yang ilegal tidak jadi

memungkinkan mereka untuk angkut penumpang sebanyak-banyaknya.”

Menurut Dirjen Budi dampak negatif dari angkutan umum ilegal ini akan semakin terasa dampak negatifnya bagi penumpang jika ada kecelakaan maka jaminan perlindungan asuransi Jasa Raharja tidak terjamin.

“Selain itu masyarakat pengguna juga tidak mendapat kepastian tarif, kepastian jadwal, serta kepastian tiba di tempat tujuan dengan selamat. Adapun bagi masyarakat pemilik perusahaan angkutan umum yang legal, keberadaan angkutan umum ilegal ini sangat merugikan dari segi pendapatan, karena sebagian penumpang yang seharusnya menggunakan armada angkutan umum legal namun kenyataannya diangkut oleh angkutan umum ilegal yang memiliki keleluasaan untuk mengangkut penumpang dari mana saja di luar terminal,” urai Dirjen Budi.

Ada 2 jenis angkutan ilegal: Yang pertama angkutan umum penumpang dengan kendaraan bermotor plat nomor berwarna kuning namun tidak dilengkapi dengan izin penyelenggaraan dan kartu pengawasan. Kedua, angkutan umum penumpang dengan kendaraan bermotor plat berwarna hitam atau yang dikenal dengan travel gelap.

“Keberadaan angkutan umum penumpang ilegal ini jelas sangat merugikan masyarakat baik selaku pengguna maupun pemilik perusahaan angkutan umum yang legal. Bagi masyarakat pengguna, angkutan umum penumpang ilegal ini tidak dapat dijamin kelaikannya karena tidak dapat diketahui status uji kir nya terutama untuk yang menggunakan plat nomor berwarna hitam. Kami menyambut baik inisiasi dari Organda saat ini untuk mengadakan webinar ini. Mudah-mudahan kolaborasi antara



Kemenhub-Organda-Polri dapat meningkatkan kehadiran angkutan umum yang legal dan baik sehingga mengurangi angkutan umum ilegal di sejumlah daerah,” ucap Dirjen Budi.

Ketua Umum DPP Organda, Adrianto Djokosoetono, mengharapkan sejumlah upaya pembinaan terhadap operator angkutan umum dapat memberikan manfaat baik terutama bagi keberlangsungan transportasi yang legal. “Organda berharap pembinaan oleh Kemenhub, Korlantas, maupun Dishub kepada operator angkutan umum ini dapat memberikan hasil positif atas kepatuhannya terhadap regulasi. Harapan kami Organda terkait rencana revisi UU 22 tahun 2009, tentu kami berharap banyak instrumen ini lebih efektif untuk memberikan rasa keamanan, asuransi, kepastian harga, maupun kepastian waktu, juga keadilan dari sisi kesempatan berusaha,” kata Adrianto saat penjelasannya dalam webinar tersebut.

Tak hanya dari Organda, dalam webinar ini juga diundang Direktur Utama PT Sumber Alam Ekspres, Anthony Steven Hambali yang menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan angkutan umum ilegal. Menurutnya dari segi pengusaha, kondisi pandemi



Para narasumber dalam Webinar Penegakan Hukum Angkutan Umum Ilegal dalam Rangka Perlindungan Keselamatan Pengguna dan Keadilan Berusaha Angkutan Umum, 23/7/2021.

kini cukup menyulitkan bagi PO untuk bertahan, terlebih dengan munculnya angkutan umum ilegal.

“Besarnya masalah angkutan ilegal ini ditindak secara serius sebelum menjamur. Angkutan legal yang terdaftar ini perlu diperhatikan dan diberikan insentif karena sebelum pandemi kami menyumbang pajak dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak,” kata Anthony.

Dari segi penegakan hukum bagi angkutan umum ilegal ini, Kasi PJR Dit Gakkum Korlantas Polri, Dodi Arifianto menjelaskan bahwa seringkali menemukan kecelakaan bus kecenderungannya adalah kurangnya kompetensi supir karena sering kali dalam kecelakaan yang mengemudi adalah bukan supir utamanya. “Angkutan umum ilegal ini sudah bisa dipastikan bahwa melanggar hukum, dapat membahayakan

keselamatan penumpang, tidak ada akuntabilitas bila terjadi kecelakaan karena tidak membayar kewajiban pajak dan asuransi karena ilegal. Penegakan hukum yang kami lakukan di jalan pada prinsipnya untuk perlindungan terutama terhadap korban. Kami sangat berharap sekali dari PO dapat menyiapkan kendaraan yang sehat dan memperhatikan kecepatan maksimal,” jabar Dodi.

Sejalan dengan usaha Kemenhub dan Korlantas Polri dalam usaha pemberantasan angkutan umum ilegal, secara khusus di Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatakan bahwa pihaknya bersama dengan TNI dan Polri telah melakukan penindakan angkutan ilegal khususnya bus kecil. Pada tahun 2020 telah terjaring sebanyak 249 kendaraan dan tahun 2021 sebanyak 151 kendaraan.



Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi membuka Webinar Penegakan Hukum Angkutan Umum Ilegal dalam Rangka Perlindungan Keselamatan Pengguna dan Keadilan Berusaha Angkutan Umum, 23/7/2021. Sumber: Tangkapan layar

“Sudah saatnya kita kedepankan teknologi untuk memangkas operasional angkutan ilegal dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi secara masif pada masyarakat bus AKAP,” ujar Syafrin.

Dalam acara ini hadir juga sebagai penanggap yaitu Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, Pengamat Kebijakan Publik Darmaningtyas, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi, Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Hubdat Suharto, dan Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat Ahmad Yani. (*)



INFO SARANA

Secara umum, angkutan umum ilegal ada dua macam, yaitu angkutan umum plat hitam dan angkutan umum resmi yang menyalahi operasional.

Kinerja layanan angkutan umum menurun, di saat angkutan pedesaan punah, angkutan perkotaan hidup segan mati tak mau. Pemerintah sangat lamban mengantisipasi kemunduran layanan angkutan umum di daerah. Baru sekarang (2020) dimulai dengan Program Angkutan Umum Perkotaan skema pembelian layanan (*buy the service*) dimulai 5 kota (Medan, Palembang, Yogyakarta, Surakarta dan Denpasar).

Sementara akses untuk mendapatkan atau memperoleh sepeda motor kian dipermudah. Tahun 2005, awal kebangkitan luar biasa produksi sepeda motor di Indonesia. Sebelumnya, dalam setahun produksi sepeda motor kurang dari 3 juta unit, melesat hingga kisaran 7 juta unit sepeda motor di tahun 2005.

Keberadaan angkutan umum plat hitam karena ada kebutuhan antara pemilik kendaraan dan penumpang yang tinggi. Ada peluang beroperasinya angkutan umum plat hitam, berkembang pesat di saat pandemi. Apalagi angkutan umum legal, seperti Bus AKDP dan Bus AKAP tidak dapat beroperasi karena ada penyekatan di sejumlah ruas jalan di daerah. Belum lagi ditambah ada perlindungan dari oknum aparat hukum bekerjasama dengan perantara (makelar), turut menambah semakin tumbuh subur angkutan umum plat hitam.

Di banyak daerah, beroperasinya angkutan umum plat hitam yang tidak terkendali berakibat hilangnya trayek sejumlah Bus AKDP dan Bus AKAP (seperti di Jambi, Kalbar, Kaltim). Bahkan, di sejumlah daerah, Bus AKDP tinggal menunggu waktu saja



Pemerintah perlu bersinergi dengan berbagai pihak terkait untuk memberantas angkutan umum ilegal atau travel gelap di Indonesia. Foto: ANTARA/ Nyoman Hendra Wibowo.

MASA PANDEMI ANGKUTAN ILEGAL MENINGKAT PESAT

Oleh: **Djoko Setijowarno**



Dibutuhkan komitmen dari semua pihak pemangku kepentingan untuk tidak mendukung operasional angkutan ilegal. Keberadaan angkutan ilegal merugikan masyarakat penggunaanya karena tidak ada jaminan keselamatan.

tidak dapat beroperasi lagi.

Para pengusaha angkutan umum plat hitam, makelar, oknum aparat melihat adanya keterbatasan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan yang hanya bisa menertibkan angkutan di dalam terminal. Angkutan umum plat hitam beroperasi di luar terminal. Masyarakat yang mau ke terminal inginnya praktis, tanpa harus jalan jauh di dalam terminal, akhirnya menggunakan jasa angkutan umum plat hitam,

walaupun konsumen tahu minim perlindungan.

Pemilik mobil, hanya menyerahkan mobil ke oknum-oknum untuk dikelola, pengemudinya juga pengemudi tembak yang penting bisa mengemudi. Terkadang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), tidak melakukan uji laik jalan (KIR), dan membayar asuransi jiwa ke PT Jasa Raharja. Jika penumpang sedikit, dikumpulkan jadi 1 mobil, untuk menghemat biaya. Jelas protokol kesehatan



Kendaraan travel gelap dan bus yang ditangkap pada operasi khusus 3 hari oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Foto: Istimewa

(prokes) tidak dipenuhi. Tanpa disadari angkutan umum pelat hitam salah satu sumber penularan COVID-19.

Saat ini sudah ada jaringan angkutan plat hitam, yang bekerjasama dengan makelar (agen), mereka juga bayar bulanan ke oknum aparat melalui perantara (masuk wilayah Jabodetabek bayar Rp 300 ribu per bulan), sehingga jadi binaan yang menguntungkan. Jika kendaraan plat kuning tidak operasi, maka para perantara dapat memobilisasi sejumlah angkutan umum plat hitam. Untuk urusan armada, angkutan umum plat hitam sudah relatif maju dengan menggunakan kendaraan berkapasitas 8-20 penumpang, seperti Toyota Hiace, Toyota Inova, Isuzu Elf, Toyota Avanza, Daihatsu GranMax.

Makin maraknya angkutan umum plat hitam sejak pemberlakuan larangan mudik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di saat angkutan umum resmi tidak boleh beroperasi, angkutan umum plat hitam mengambil alih sejumlah penumpang masih melakukan perjalanan antar kota.

Karakteristik angkutan plat hitam Dinas Perhubungan DKI Jakarta (2021) telah merilis karakteristik, operasional dan dampak angkutan plat hitam yang beredar di Jakarta. Kepemilikan kendaraan bisa sewa bulanan, setoran harian, milik perorangan yang bergabung dalam paguyuban. Tidak mengurus perizinan karena tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan angkutan umum, dan tidak membayar pajak sebagai perusahaan angkutan umum.

Pemasaran melalui daring (*online*) dalam suatu komunitas secara *online*/via medsos. Diberikan tanda berupa stiker untuk memberikan tanda bergabung dalam komunitas yang berfungsi untuk penanganan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dan menjamin operasional di lapangan (oleh oknum/pengurus).

Operasional angkutan plat hitam, berupa (1) bus kecil plat hitam (kubikasi lebih 2.000 cc) digunakan untuk melayani angkutan antar jemput antar kota antar provinsi; (2) mobil penumpang plat hitam (kubikasi 1.000 cc - 1.500 cc) digunakan untuk melayani angkutan antar jemput antar kota antar provinsi; dan (3) tujuan yang dilayani sebagian besar jarak kurang dari 500 km dengan waktu perjalanan selama 4 sampai 6 jam, antara lain Cirebon, Kuningan, Tegal, Brebes, Pemalang, Purwokerto, Solo, Banjar, Lampung.

Dampak angkutan plat hitam adalah meningkatnya angka

penularan COVID-19 karena tidak mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, kerugian bagi angkutan yang legal, angka kecelakaan yang tinggi, kurangnya perlindungan hukum bagi penumpang, dan berkurangnya pemasukan negara/daerah.

Aturan dan sanksi pelanggaran Pasal 173 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki (a) izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; (b) izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/ atau (c) izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. Kewajiban memiliki izin tidak berlaku untuk (a) pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau (b) pengangkutan jenazah.

Sementara sanksi ada di pasal 308, menyatakan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu, untuk setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang (a) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek; (b) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek; (c) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat; atau (d) menyimpang dari izin yang ditentukan.

Sanksi yang dikenakan pemilik kendaraan sangatlah ringan, sehingga perlu merevisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jalin komunikasi

Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebagai kepanjangan wewenang Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di daerah dapat menjalin komunikasi dengan para pengusaha angkutan umum pelat hitam di daerah.

Sekaligus dapat melakukan pembinaan dan ada kegiatan sosialisasi peraturan perijinan angkutan umum. Peraturan tentang perijinan angkutan umum disederhanakan, sehingga mudah dimengerti para pengusaha angkutan umum di daerah.

Penegakkan hukum tetap dilakukan

jika masih ada yang melanggar dan merupakan upaya akhir setelah semua proses di atas dilakukan. Sesungguhnya, para pengusaha angkutan umum plat hitam mau melegalkan, cuma mereka kurang tahu caranya.

Kemudian, keberadaan pool bus dan pick up point dilegalkan dan bagian dari pengawasan Korsatpel Terminal terdekat. Digitalisasi terminal agar segera diterapkan untuk membantu mengawasi mobilitas angkutan umum.

Merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti sanksi bagi yang melanggar dinaikkan (pemilik dan pengemudi), memperluas kewenangan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS).

Yang penting sekarang adalah komitmen dari pihak-pihak TNI /POLRI (juga Anggota DPR RI) untuk tidak jadi backing dan mengarahkan atau mensosialisasikan pemilik angkutan umum ilegal untuk menjadi legal.(*)

Angkutan Pelat Hitam Lecehkan Institusi Negara

Stiker yang bertuliskan Sinergitas TNI Polri dan Dishub Nusantara menempel di kaca belakang angkutan umum pelat hitam. Pemasangan stiker itu sebagai jaminan untuk meloloskan diri dari pengecekan dan penyekatan di saat pandemi. Seolah-olah institusi TNI, POLRI dan Dinas Perhubungan berkolaborasi untuk melakukan permufakan jahat. Pemasangan stiker ini merupakan pelecehan terhadap institusi negara. Harus ada tindakan hukum dari aparat penegak hukum.



Stiker yang ditempelkan pada angkutan umum pelat hitam

Maraknya angkutan umum pelat hitam (travel gelap) merupakan kebutuhan perjalanan yang tidak dapat diakomodir layanan angkutan umum resmi atau legal. Sebagian masyarakat yang beraktivitas di Kawasan Jabodetabek yang berasal dari pedesaan banyak yang memanfaatkannya. Keberadaan kendaraan umum pelat hitam yang beroperasi ke Kawasan Jabodetabek mudah dikenali dengan tempelan stiker bertuliskan Sinergitas TNI Polri dan Dishub Nusantara.

Kendaraan memiliki stiker sebagai penanda travel gelap untuk menghindari razia. Apalagi di masa pandemi covid kerap

dilakukan penyekatan pada saat mudik lebaran, PSBB, PKMM Darurat dan yang terakhir PKMM Level4 tidak akan mempengaruhi operasi kendaraan ini. Sementara angkutan umum yang resmi dilarang beroperasi. Makin menambah marak keberadaan angkutan umum pelat hitam. Seolah tidak mengenal batasan operasional.

Pola perjalanan

Keberadaan angkutan pedesaan sebagai penyambung atau penghubung antara desa dengan Terminal Tipe A sudah banyak yang penuh. Sebagai penggantinya angkutan ojek pangkalan yang tarifnya tidak terkendali alias mahal. Dengan



beroperasinya angkutan umum plat hitam dianggap membantu memudahkan mendapatkan layanan angkutan umum *door to door* mengantarkan penumpang sampai dengan tujuan penumpang.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan untuk penumpang barasal dari Jawa Tengah. Asal perjalanan dari Jawa Tengah adalah Kab. Brebes, Kab. Banyumas, Kab. Grobogan, Kab. Tegal, Kab. Wonosobo dan Kab. Banjarnegara. Penumpang dijemput sesuai dengan titik *share location* yang diberikan kepada agen.

Tarif hari normal (*weekday*) Rp 250 ribu dan akhir pekan (*weekend*)/libur Rp 300 ribu -350 ribu. Ramainya penumpang di hari Jumat dan Minggu. Penumpang dijemput sesuai dengan titik *share location* yang diberikan kepada agen. Jam keberangkatan kisaran pukul 16.00 - 19.00.

Kendati ada perbedaan tarif kisaran Rp 100 ribu - Rp 150 ribu lebih tinggi dibanding menggunakan angkutan umum resmi. Namun, ada keluwesan dalam pembayaran, yakni pembayaran dapat dilakukan di awal atau sesudah penumpang tiba di tempat tujuan. Bahkan, ada layanan penawaran promo jika berombongan 6-7 penumpang, dapat gratis satu penumpang.

Selama perjalanan pasti melakukan transit di titik kumpul yang telah ditentukan. lokasi istirahat di tempat yang telah ditentukan. Lokasi istirahat merupakan titik kumpul semua kendaraan yang berasal dari asal keberangkatan sebagai lokasi istirahat bagi pengemudi dan penumpang. Jam istirahat antara jam 20.00 - 00.00 dengan durasi waktu istirahat kisaran 45 menit - 1 jam. Lokasi transit untuk keberangkatan dari Jawa

Tengah di rumah makan yang dekat Gerbang Tol Pejagan dan Gerbang Tol Ciledung.

Pihak travel gelap memberikan jaminan bagi penumpang tidak ada pemeriksaan rapid test lolos dari pemeriksaan saat razia dan diantar sampai ke lokasi tujuan penumpang. Jelas sekali operasi travel gelap ini mengancam upaya pengendalian penularan Covid-19 dan membahayakan keselamatan warga. Penumpang travel gelap tidak berhak mendapat jaminan asuransi akibat kecelakaan lalu lintas.

Daerah tujuan operasi travel gelap adalah Bogor, Depok, Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Karawang.

Maraknya bisnis travel gelap ini telah membikin gemas dan resah di kalangan para pengusaha angkutan umum resmi. Di satu sisi, angkutan umum resmi diminta taat regulasi, sementara di sisi lain ada angkutan umum yang tidak taat regulasi dan makin marak beroperasi tanpa ada upaya tindakan tegas untuk memberantasnya. Bisnis travel gelap beroperasi sudah sejak lama dan jumlahnya sudah ratusan armada setiap hari yang masuk Jabodetabek.

Upaya preventif

Keberadaan travel gelap ini telah mengganggu operasional angkutan umum resmi, seperti Bus AKAP, Bus AKDP dan AJAP. Penumpang dan operator angkutan umum resmi harus mengikuti protokol kesehatan covid-19 yang sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan.

Selain menjalin komunikasi dan sosialisasi peraturan yang sudah disederhanakan, perlu juga sekali waktu dilakukan penegakan hukum di lokasi tempat transit (rumah makan) yang sering digunakan. Kendaraan dikandangkan dalam kurun waktu yang lama dan institusi

yang mengandangkan juga harus diawasi supaya tidak terulang kasus lama.

Panglima TNI dan Kapolri perlu mempertegas agar prajuritnya tidak diijinkan menjadi becking bisnis angkutan umum plat hitam. Oknum TNI dan Polri yang menjadi becking bisnis ini telah mencoreng institusinya sendiri, sehingga perlu tindakan tegas terhadap oknum ini dari atasannya.

Aplikasi pelaporan angkutan umum plat hitam dapat segera dibuat. Untuk memudahkan pengawasan bersama, aplikasi tersebut nantinya dapat terhubung dengan Korlantas Polri, Kantor Staf Presiden, Tim Cyber Pungli dan beberapa institusi lainnya yang berhubungan dengan pengawasan.

Operasi travel gelap tidak hanya dari Jateng dan Jabar ke Jabodetabek, namun sudah lama merambah di semua wilayah provinsi di Indonesia. Dampaknya, keberadaan layanan Bus AKDP dan Bus AKAP makin menurun, bahkan ada beberapa provinsi sudah tidak ada layanan Bus AKDP.

Perlu duduk bersama mengadakan Rapat Kordinasi antara TNI, Polri dan Kementerian Perhubungan untuk menuntaskan angkutan umum pelat hitam ini.

Untuk jangka panjang, perlunya melakukan penataan angkutan umum secara menyeluruh mengingat begitu cepatnya perkembangan teknologi dan sistem informasi yang dapat memudahkan orang mendapatkan layanan angkutan umum dengan cepat dan efisien. (*)

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat



Dalam mewujudkan seruan PBB untuk mengkampanyekan keselamatan berkendara di jalan dengan cara pembatasan kecepatan rendah (30km) di area pemukiman tempat tinggal, sekolah, maupun tempat beraktivitas maka Kementerian Perhubungan menggelar kegiatan Bincang Santai Koalisi Teman Sejati (Selamat di Jalan dan Hati-hati) pada Senin (20/9) siang. Dalam kegiatan yang berformat webinar ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menginginkan terciptanya keamanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

Saat menyampaikan sambutan pembukanya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan bahwa ada beberapa jenis transportasi yang harus didorong misalnya seperti transportasi berbasis umum atau massal dan juga transportasi hijau yang tidak menimbulkan polusi seperti sepeda, sepeda listrik, maupun pejalan kaki.

“Kita ingin negara kita dapat menekan polusi udara dan memperbaikinya. Yang kita harapkan bagaimana penggunaan sepeda didorong untuk keperluan masyarakat dan menggantikan sepeda motor atau mobil kita. Dengan Penerapan Jaga Laju 30, ini artinya tidak hanya bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan, akan tetapi juga untuk Kesehatan, Ramah Lingkungan dan layak huni bagi para pengguna jalan khususnya pengguna jalan yang rentan, seperti pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas dan bertransportasi,” ujar Dirjen Budi.

Untuk mendukung dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan selamat bagi masyarakat, saat ini Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan berbagai regulasi sebagai komitmen bersama



Direktur Sarana Transportasi Jalan, M. Risal Wasal menjadi narasumber dalam kegiatan Bincang Santai Koalisi Teman Sejati (Selamat di Jalan dan Hati-hati), 20/9/2021.

JAGA LAJU 30

koalisi teman

SEJATI SELAMAT DI JALAN DAN HATI-HATI

Dengan Penerapan Jaga Laju 30, ini artinya tidak hanya bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan, akan tetapi juga untuk kesehatan, ramah lingkungan dan layak huni bagi para pengguna jalan, khususnya pengguna jalan yang rentan.

- untuk mendorong penggunaan Kendaraan yang Ramah Lingkungan, antara lain:
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Penerapan Tata Cara Batas Kecepatan;
 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan;
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Dirjen Budi, dalam materi yang dipaparkan oleh Direktur Sarana Transportasi Jalan, M. Risal

Wasal menyampaikan bahwa batas kecepatan 30 km/jam pada kawasan tertentu seperti lingkungan tempat tinggal, bekerja, maupun bermain ini perlu untuk menghadirkan keselamatan, kesehatan, ramah lingkungan, dan layak huni. Sehingga semua pengguna jalan terjamin keamanan dan keselamatannya.

“Pada sisi keselamatan, target kita adalah bagaimana mengurangi cedera dan kematian. Bahkan ditargetkan harus menciptakan *zero fatality accident* atau tidak ada korban meninggal. Sementara mengenai kesehatan adalah bagaimana kita meningkatkan jumlah orang yang berjalan dan bersepeda. Ramah lingkungan adalah bagaimana menciptakan kendaraan yang rendah emisi gas buang. Sementara layak huni

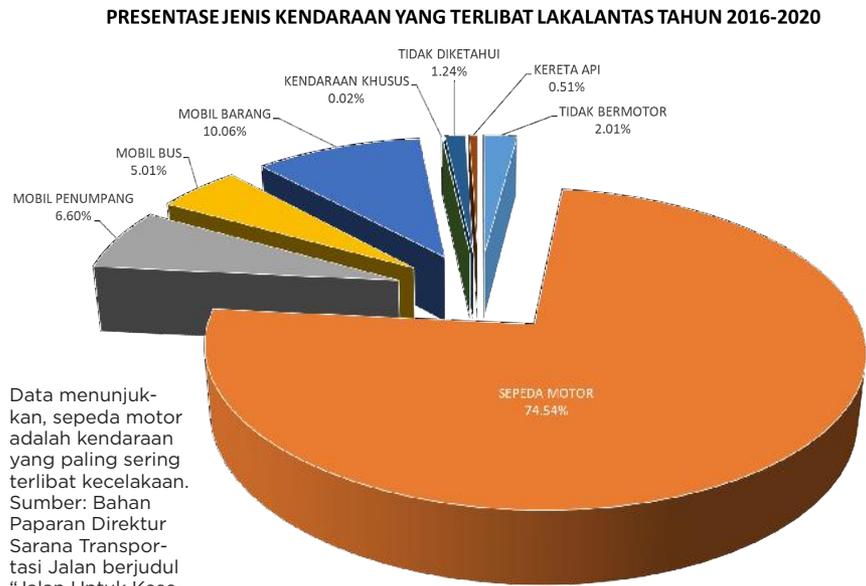
berarti menciptakan jalan yang berkeselamatan,” jelas Risal.

Risal juga menjelaskan bahwa ada 5 aksi dalam menciptakan jalan yang berkeselamatan, yakni:

1. Membangun jalan beserta perlengkapannya,
2. Menetapkan batas kecepatan yang sesuai dengan fungsi tiap jalan,
3. Menaati batas kecepatan,
4. Memasang fitur keselamatan pada kendaraan, dan
5. Meningkatkan kesadaran tentang bahaya berkendara dengan kecepatan tinggi di jalan.

Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sekaligus pengamat transportasi, Djoko Setijowarno menjabarkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban usia SMP- SMA sangat tinggi, sehingga perlu adanya pembenahan untuk menekan fatalitas kecelakaan lalu lintas.

“Melihat angka kecelakaan yang agak miris adalah korban di kelompok usia SMP- SMA yang sangat tinggi sekali. Artinya ini harus menjadi penekanan khusus bagi program keselamatan ke depannya. Di masa pandemi, angka kecelakaan menurun karena mobilitas juga menurun. Namun di sisi lain juga ada yang beralih ke kendaraan pribadi



Data menunjukkan, sepeda motor adalah kendaraan yang paling sering terlibat kecelakaan. Sumber: Bahan Paparan Direktur Sarana Transportasi Jalan berjudul “Jalan Untuk Keselamatan”



(selama pandemi). Hal yang sama memang ada ketakutan untuk menggunakan angkutan umum, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Namun

bedanya di luar negeri mereka beralih menggunakan sepeda karena jarak tempat tinggal dan bekerja tidak terlalu jauh,” jelas Djoko. Djoko menilai bahwa peranan Kepala Daerah melalui pemerintah daerah dan kolaborasi berbagai pihak sangat berperan penting untuk mewujudkan

keselamatan lalu lintas dan berkendara ini. “Intinya kalau kepala daerahnya peduli maka dari Dinas Perhubungannya biasanya akan mengikuti. Maka di sini juga diperlukan peran teman-teman komunitas untuk menyuarakan hal ini hingga ke daerah-daerah,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Rudy Saptari, Key Opinion Leader sekaligus tokoh pebalap nasional, Alexandra Asmasoebarta sebagai, Ketua Bike2Work, Fahmi Saimima, Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, dan Ketua Road Safety Association (RSA) Indonesia, Ivan Virnanda serta perwakilan dari berbagai komunitas lainnya.*



INFO TSDP

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Selasa (10/8) pagi melakukan Peluncuran Kapal Penyeberangan Penumpang Ro-Ro 300 GT (KMP. Tirus Meranti) lintas Pecah Buyung - Alai Insit sebagai Angkutan Penyeberangan di Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. KMP. Tirus Meranti ini diluncurkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dengan didampingi oleh Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP), Cucu Mulyana di PT. Multi Ocean Shipyard, Tanjung Balai Karimun.

“Pada kesempatan ini, saya atas nama Pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan menyampaikan ucapan selamat kepada Direksi dan segenap karyawan di PT. Multi Ocean Shipyard yang telah mendapatkan kepercayaan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan kapal penyeberangan penumpang Ro-Ro 300 GT lintas Pecah Buyung - Alai Insit. Selamat karena telah menyelesaikan pembangunan kapal ini sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, sehingga performa dan stabilitas kapal saat beroperasi nanti bisa maksimal sesuai dengan yang telah direncanakan dan diharapkan,” kata Dirjen Budi saat menyampaikan sambutannya dalam peluncuran KMP. Tirus Meranti.

Adapun spesifikasi KMP. Tirus Meranti yakni panjang keseluruhan 39,38 m, lebar 11 m, tinggi 3,30 m, kecepatan dinas 10 knot, muatan penumpang 180 orang, muatan kendaraan 21 unit sedan (MPV), 12 truk sedang, dan 7 unit truk besar.

Dengan spesifikasi dan kapasitas angkut yang telah ditetapkan oleh Satker Direktorat Transportasi Sungai Danau dan



Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi bersama Wakil Bupati Kepulauan Meranti, H.Asmar melakukan prosesi pemotongan pita sebagai tanda peluncuran KMP. Tirus Meranti yang melayani lintas penyeberangan Pecah Buyung - Alai Insit, Provinsi Riau, 10/8/2021. Foto: HMS DJPD/ MAD

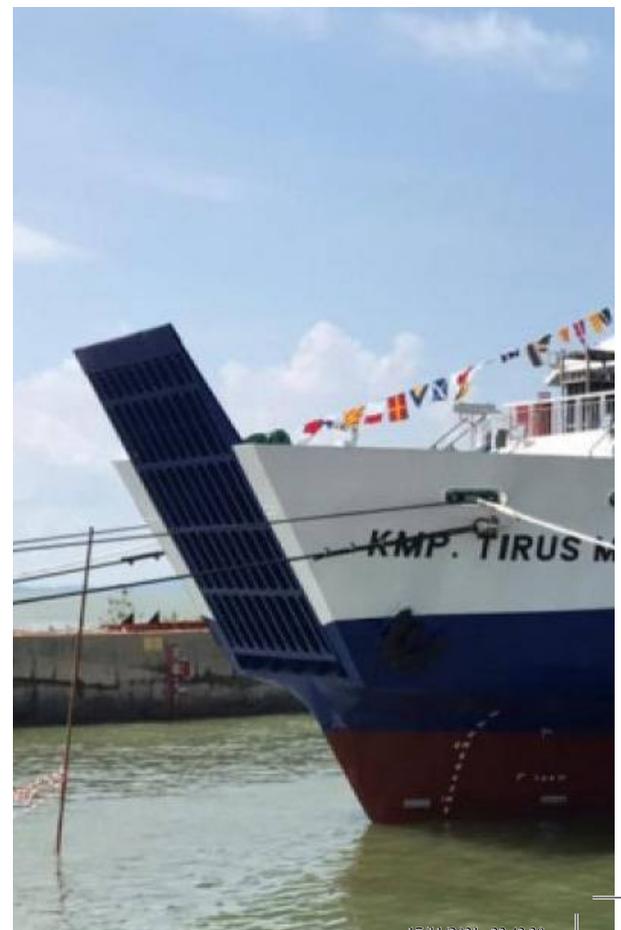
KMP. TIRUS MERANTI LAYANI LINTAS PECAH BUYUNG-ALAI INSIT

Peluncuran kapal merupakan hal penting dari bagian pembangunan kapal, karena pada saat itulah untuk pertama kalinya sebuah kapal akan mengapung di air. Momen ini akan dicatat sebagai tanggal dimulainya perhitungan yang terkait dengan *docking* periodik kapal tersebut.

Penyeberangan, Dirjen Budi berharap dapat memperlancar transportasi dan meningkatkan konektivitas di wilayah Kabupaten Meranti, Provinsi Riau serta selesainya pembangunan kapal penyeberangan ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Dalam kesempatan kali ini, saya menyampaikan bahwa peluncuran kapal merupakan hal penting dari bagian pembangunan kapal, karena pada saat itulah untuk pertama kalinya sebuah kapal akan mengapung di air. Momen peluncuran kapal ini pun akan dicatat sebagai tanggal dimulainya perhitungan yang terkait dengan *docking* periodik kapal tersebut,” katanya.

Sementara Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan





Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi didampingi Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Cucu Mulyana dan pejabat terkait lainnya pada acara peluncuran KMP. Tirus Meranti, Riau, 10/8/2021. Foto: HMS DJPD/MAD



Penyeberangan, Cucu Mulyana, menjabarkan bahwa Tahun Anggaran 2021 ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Satker Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan melaksanakan pembangunan kapal penyeberangan sebanyak 5 (lima) unit kapal penyeberangan termasuk KMP. Tirus Meranti.

“Pembangunan kapal-kapal tersebut merupakan perwujudan komitmen pemerintah untuk selalu memberikan kemudahan aksesibilitas bagi pelaksanaan pembangunan daerah terutama di wilayah-wilayah yang

terpencil sesuai misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu menciptakan sistem pelayanan transportasi darat yang aman, selamat, dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia. Kepada segenap jajaran PT. Multi Ocean Shipyard dan Konsultan Pengawas PT. Refindo Ewimora kami ucapkan selamat karena telah menyelesaikan pembangunan KMP. Tirus Meranti ini dengan baik, sampai dengan peluncuran ini progres fisik telah mencapai 92%, maka pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi - tingginya atas

prestasi, kerja keras, keseriusan, dan komitmen yang telah ditunjukkan oleh PT. Multi Ocean Shipyard,” ucap Cucu.

Melalui kehadiran KMP. Tirus Meranti ini, Dirjen Budi berharap agar kapal penyeberangan yang akan dioperasikan ini dapat dimanfaatkan secara optimal serta berfungsi semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat di Kabupaten Meranti. Turut hadir juga dalam kegiatan ini yaitu Wakil Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H.Asmar.(*)



KMP. Tirus Meranti diluncurkan, kapal ini akan melayani lintas penyeberangan Pecah Buyung - Alai Insit, 10/8/2021. Foto: HMS DJPD/MAD



ANGKUTAN

DITJEN HUBDAT TEMUKAN 16 PENUMPANG BUS AKAP TANPA PERSYARATAN LENGKAP



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada Selasa (13/7) kemarin melakukan pengawasan ketat terhadap angkutan umum seperti bus AKAP yang mengangkut penumpang tanpa membawa persyaratan lengkap. Dalam kegiatan ini telah diamankan 2 unit bus AKAP dari PO Setia Negara dan Dewi Sri yang mengangkut 16 penumpang tanpa surat keterangan dan tidak memenuhi syarat perjalanan selama masa PPKM Darurat.

Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani menjelaskan bahwa personil Ditjen Hubdat bersama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan TNI telah melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap bus-bus Angkutan Antarkota Antarprovinsi yang mengangkut penumpang tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen perjalanan.

"Kami bersama-sama menjaga agar Covid-19 bisa kita atasi dengan segera. Ini merupakan tuntutan agar pergerakan masyarakat bisa kita batasi. Hasilnya adalah 2 bus yang saat ini ada di Cilincing kami amankan agar tidak melakukan perjalanan. Mereka sudah melanggar SE Satgas karena berangkat tanpa memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang dibawa oleh penumpangnya," kata Yani.

Kedua bus tersebut yaitu PO Dewi Sri bernomor polisi G 7086 OE tujuan Pekalongan saat itu mengangkut 1 orang tanpa surat keterangan apapun. Sementara PO Setia Negara bernomor polisi E 7742 YC dengan tujuan Cirebon dan Kuningan mengangkut penumpang berjumlah 15 orang tanpa membawa surat keterangan apapun. (*)



Direktur Lalu Lintas Jalan, Suharto dalam kegiatan Launching Mobile Sistem Perlengkapan Jalan yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom, 4/7/2021. Sumber: Tangkapan layar aplikasi zoom

LALU LINTAS

KEMENHUB LUNCURKAN APLIKASI MOBILE SISTEM PERLENGKAPAN JALAN SIP-AJA

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berupaya dalam mempermudah dan mempercepat penyelenggaraan perlengkapan jalan melalui sebuah aplikasi mobile Sistem Informasi Perlengkapan Jalan atau yang dapat disebut SIP-AJA. Peluncuran aplikasi SIP-AJA dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom pada Rabu (14/7).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Lalu Lintas Jalan yang telah menyusun dan meluncurkan aplikasi SIP-AJA. Ia berharap melalui aplikasi ini inventarisasi dan identifikasi perlengkapan jalan khususnya di jalan nasional dapat terdata dengan rapi sehingga memudahkan proses pengadaan hingga pemeliharaan.

"Di era digitalisasi 4.0 saat ini, memang sudah seharusnya kita memanfaatkan teknologi agar dapat bekerja lebih efektif, efisien, serta akuntabel. Nantinya aplikasi SIP-AJA akan mempermudah dalam aspek perencanaan, pengawasan, penyelenggaraan, dan pemantauan kinerja perlengkapan jalan di seluruh jalan nasional yang dilengkapi dengan visualisasi," jelas Dirjen Budi.

Keberadaan aplikasi mobile SIP-AJA juga dimaksudkan agar memudahkan Direktorat Lalu Lintas Jalan dalam menyusun Kebijakan Pengadaan Perlengkapan Jalan ke depan. "Dalam penyelenggaraan perlengkapan jalan nanti akan diambil kebijakan skema pembelian layanan atau buy the service, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan berbasis per jenis perlengkapan jalan dan pengadaan yang dilakukan

dengan e-katalog sektoral atau toko daring," papar Dirjen Budi.

Kebijakan tersebut diambil dengan tujuan agar risiko yang selama ini ditanggung pemerintah dapat dibagi ke pihak kedua atau ketiga. Di samping itu, agar layanan kinerja perlengkapan jalan lebih terjamin dan dapat lebih banyak melibatkan peran UMKM untuk ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan dan pengoperasiannya.

"Adanya kebijakan buy the service juga dapat membuat aset yang dimiliki pemerintah lebih terproteksi serta kontrak layanan dapat berlangsung multi years," tambah Dirjen Budi.

Direktur Lalu Lintas Jalan, Suharto, dalam laporannya juga mengatakan bahwa pihaknya masih mengalami kesulitan dalam hal pelaporan dan evaluasi perlengkapan jalan saat ini. Oleh karena itu, aplikasi SIP-AJA dapat bermanfaat sebagai alat bantu untuk memudahkan penyusunan kebijakan pengadaan perlengkapan jalan di masa yang akan datang.

"Aplikasi ini merupakan pengganti dari Survei Investigasi Desain (SID) yang selama ini biasa kita lakukan 5 tahun sekali. Sedangkan, kebutuhan perlengkapan jalan bersifat dinamis, sangat tergantung pada kondisi lalu lintas dan perkembangan tata guna lahan," ungkap Suharto.

Plt. Kasubdit Perlengkapan Jalan, M Husein Saimima, turut mengungkapkan bahwa aplikasi SIP-AJA merupakan sebuah solusi atas pemantauan kondisi dan kinerja perlengkapan jalan yang sebelumnya masih menggunakan cara konvensional. (*)

SARANA

GELAR WEBINAR INTERNASIONAL, DITJEN HUBDAT AJAK GENERASI MUDA KAMPANYEKAN KESELAMATAN JALAN



Demi mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menilai perlu adanya pendidikan mengenai keselamatan berlalu lintas di jalan yang menyasar pada mahasiswa dan taruna di lingkungan Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama dengan Indonesia Road Safety Partnership (IRSP) menggelar webinar internasional yang bertajuk “Indonesia Youth Road Safety Warriors” pada 21-22 September 2021.

Melalui acara yang digelar secara *hybrid* tersebut pada hari kedua, Rabu (22/9), Direktorat Sarana Transportasi Jalan, M. Risal Wasal menyampaikan bahwa saat ini perlu dilakukan pendidikan mendalam maupun sistem bertransportasi yang mengutamakan keselamatan sekaligus mendorong hadirnya transportasi berkelanjutan.

“Kita harus sepakat dulu bahwa keselamatan itu harus ada di hati, sudah bukan waktunya lagi untuk sebatas

dipikirkan tapi justru nomor satu. *Safety* adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Ini juga yang harus diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang muda keselamatan untuk membantu Pemerintah mewujudkan *road safety with sustainable transportation system*. Harapannya angka kecelakaan dan tingkat fatalitas kecelakaan dapat kita turunkan,” kata Risal.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berusaha mewujudkan keselamatan menjadi sebuah hal yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam sistem kerja dan tujuan dari setiap direktorat teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. “Mulai dari regulasi, sarana, prasarana, infrastruktur, dan sistem Ditjen Hubdat mempersiapkan keselamatan,” ujar Risal.

Risal juga menyampaikan harapannya kepada para mahasiswa dan taruna selaku generasi muda. “Kami mempunyai harapan besar bagi para pejuang muda ini agar dapat meningkatkan *leadership of road* dalam menyuarakan keselamatan bertransportasi. Selain itu juga dapat menjadi *agent of change* dengan pemanfaatan teknologi, serta berkomitmen dalam mewujudkan transportasi yang berkeselamatan dan berkelanjutan,” jelasnya. (*)

ANGKUTAN

UPAYAKAN KURANGI EMISI KENDARAAN, KEMENHUB-ITDP INDONESIA TEKEN NOTA KESEPAHAMAN



Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia pada Kamis (30/9). Nota kesepahaman tersebut yakni mengenai Pengurangan Emisi Melalui Integrasi dan Optimasi dalam Transportasi Umum di Indonesia.

“Penandatanganan nota kesepahaman dengan ITDP Indonesia ini dalam rang-

ka mereduksi penggunaan BBM dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk penggunaan kendaraan umum yang saya kira sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini begitu berkomitmen bagaimana menyadarkan masyarakat dan mengedukasi bahwa penggunaan kendaraan umum itu jauh lebih baik dari kendaraan pribadi,” demikian dijelaskan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi se usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman.

“Kami menyambut baik atas kerjasama yang dilakukan sehingga diharapkan dengan mou ini kita akan menyusun sama-sama rencana yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan dengan ITDP dalam rangka mendorong penggunaan angkutan umum massal, sepeda, dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih hijau,” tambahnya.

Kerjasama ini nantinya akan memberikan pemahaman bagi penyelenggara sistem angkutan umum massal mengenai pembangunan transportasi berkelanjutan, termasuk penerapan perspektif gender dan isu inklusivitas di dalamnya.

“Dengan nota kesepahaman ini kami ingin mengajak Pemerintah Daerah untuk memperbaiki angkutan umum dan pedestriannya. Polusi udara disebabkan masifnya penggunaan kendaraan bermotor. Saat ini saya melihat kemajuan penggunaan angkutan massa perkotaan baik infrastruktur maupun prasarana yang dalam beberapa tahun terakhir cukup bagus. Di Jakarta sudah beroperasi MRT dan LRT, di Palembang juga sudah digunakan LRT. Untuk angkutan bus massal, Pemerintah telah menyiapkan beberapa sarana transportasi berupa bus untuk diperbantukan kepada daerah dengan skema BRT, namun pada perkembangannya karena kemampuan Pemda banyak beroperasi kurang bagus sehingga di 2020 kita mulai membangun skema *Buy The Service* (BTS). Untuk di Surabaya dan Bandung juga akan kita gunakan bus listrik untuk mengurangi emisi,” jelas Dirjen Budi.

Dalam pernyataannya, Dirjen Budi juga menyatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada ITDP yang proaktif mengajak Pemerintah Indonesia karena ia ingin mengajak semua masyarakat untuk sadar bahwa hidup tidak hanya untuk masa sekarang saja. (*)

REGULASI / PRASARANA

DITJEN HUBDAT GELAR SOSIALISASI PM 24/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN



Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat 2021 khususnya terkait Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan di Courtyard Nusa Dua Bali, Kamis (23/9).

"Mencabut dari peraturan sebelumnya yaitu PM 132 Tahun 2015, saat ini terdapat substansi baru sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 yaitu tata cara

penyelenggaraan terminal penumpang yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, swasta, atau usaha mikro dan kecil serta penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30 persen," tutur Kepala Bagian Hukum dan Humas Setditjen Perhubungan Darat, Endy Irawan mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Endy menambahkan, "Mengingat dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan ini melibatkan banyak pemangku kepentingan dan kewenangan, baik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan stakeholder, oleh karena itu saya menyambut baik diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini dan mengharapkan agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan".

Plt. Kasubdit Terminal Angkutan Jalan, Ahmadi ZB yang hadir sebagai narasumber membahas lebih lanjut terkait PM 24 Tahun 2021 tersebut. "Lingkup pembahasan pada PM ini antara lain: perencanaan; pembangunan; pengembangan; fasilitas terminal; pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas; lingkungan kerja dan daerah pengawasan; pengoperasian; SDM; SPM dan penilaian kinerja; sistem manajemen informasi; serta pembiayaan terminal," papar Ahmadi.

Pada kesempatan ini Endy mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, atas kesediaannya untuk memberikan paparan pada kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan, meskipun dalam situasi pandemi namun tetap tidak mengurangi semangat dan niat baik kita untuk kemajuan negeri ini.

Turut hadir dalam sosialisasi ini Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan Hary Kriswanto secara virtual, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII Bali dan NTB, Muiz Tohir.



Setelah acara sosialisasi tersebut selesai, dilakukan peninjauan ke Terminal Tipe A Mengwi untuk melihat operasional Terminal Penumpang saat ini yang didampingi oleh Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Mengwi, Badung, Bali, Ahmad Erwin Rahadi.*

ANGKUTAN

KEMENHUB BERIKAN BANTUAN PAKET SEMBAKO BAGI MITRA TRANSPORTASI DI BANDUNG



Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat membagikan bantuan paket sembako sebagai bantuan sosial kepada masyarakat Bandung dan sekitarnya, khususnya para pekerja di sektor transportasi. Kegiatan ini berlangsung di Terminal Leuwipanjang, Bandung pada Rabu (4/8) siang. Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menjelaskan, "Bapak Menteri Perhubungan memerintahkan saya untuk

membantu penanggulangan Covid-19 tidak hanya untuk sektor transportasi saja. Saya diminta untuk membantu kesulitan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Kami juga mendapat dukungan dari BUMN melalui program CSR dan APM Gaikindo yang menyiapkan beberapa paket sembako untuk masyarakat termasuk hari ini yang akan kita bagikan di Terminal Leuwipanjang," jelasnya.

Dirjen Budi menyampaikan bahwa pihaknya bekerjasama dengan PT. Jasa Raharja dan PT. Astra International Tbk memberikan bantuan sosial berupa 1.000 paket sembako. Paket sembako tersebut telah disalurkan kepada pengemudi ojek online, ojek pangkalan, pengemudi angkot, porter terminal, dan masyarakat di sekitar terminal.

"Para pengemudi ojek, mitra transportasi termasuk pengemudi angkot itu yang paling membutuhkan. Ini juga bagian dari komitmen Kemenhub untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat meringankan beban masyarakat. Sesuai dengan hasil koordinasi kami

dengan Gubernur Ridwan Kamil, vaksin juga sangat dibutuhkan, oleh karena itu bersama Dirut Jasa Raharja kami juga akan membantu pengalokasian vaksin di Bandung dan juga Jakarta", demikian lanjut Dirjen Budi.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan apresiasinya terhadap kegiatan yang dilakukan di Terminal Leuwipanjang tersebut. "Saya sebagai Gubernur mengapresiasi Dirjen Hubdat yang sudah meringankan beban masyarakat pada saat PPKM Level 4 di Kota Bandung. Kasus dari hari ke hari semakin turun, ketersediaan rumah sakit juga sudah 51%, sudah di bawah standar kritis WHO, bulan lalu puncaknya 91%. Keberhasilan PPKM ini juga mendapatkan sebuah pengorbanan dari masyarakat yang ekonominya terdampak karena mobilitasnya harus dibatasi. Kami bersyukur penerima bansos sudah naik dari 40% persen menjadi 63%. Meskipun demikian angka ini belum cukup, inilah yang dibantu oleh semua pihak termasuk hari ini oleh Ditjen Hubdat, PT. Jasa Raharja dan PT. Astra International Tbk," ujarnya.*



ANGKUTAN

DIBUTUHKAN MASYARAKAT SELAMA PPKM DARURAT, OJOL BOLEH MELINTAS PENYEKATAN



Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan PPKM Darurat, masyarakat yang tidak termasuk sektor esensial dan kritikal diharuskan bekerja dari rumah atau *work from home*. Oleh karena itu keberadaan jasa ojek *online* (ojol) untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat mutlak diperlukan. Jasa ojol pada umumnya digunakan untuk pengantaran barang atau pun makanan, dan sebagainya.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengatakan, "Saat ini, banyak masyarakat yang terpaksa harus bekerja dari rumah, untuk belanja kebutuhan sehari-hari atau pun makanan, mereka biasa menggunakan jasa ojol. Oleh karena itu setelah kami bahas bersama tadi, kesimpulannya ojol boleh melintas penyekatan." Hal tersebut disampaikannya usai menggelar rapat terbatas secara daring, Sabtu (17/7/2021). Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah pihak terkait, antara lain, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kabag Ops Korlantas Polri, Kadishub Prov DKI, Staff Khusus Menhub bidang SDM dan Humas, serta perwakilan dari masing-masing aplikasi ojol.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo menegaskan, pihaknya memberikan prioritas melintas di titik penyekatan kepada seluruh pengemudi ojek berbasis aplikasi online alias ojol. Menurutnya, operasional ojol sangat penting selama pelaksanaan PPKM Darurat. "Kalau untuk ojol kami prioritaskan ya. Karena di masa pandemi ini semua orang stay at home di rumah, jadi untuk mengurus paket, makanan, dan sebagai macam, mereka menggunakan ojol. Saya sudah sampaikan kepada semua anggota saya, saya tekankan lagi hari ini untuk ojol kami prioritaskan melewati titik penyekatan," kata Sambodo.*

TSDP

PENGGUNA JASA PENYEBERANGAN DIIMBAU LENGKAPI SYARAT PERJALANAN



Seiring dengan berlakunya PPKM Darurat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menerbitkan SE 43 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi menegaskan kembali bagi pelaku perjalanan dengan angkutan penyeberangan agar menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun

TSDP

DIRJEN HUBDAT PERKETAT PELAKSANAAN PPKM DARURAT DI PENYEBERANGAN KETAPANG-GILIMANUK



Kementerian Perhubungan telah menetapkan ketentuan baru terkait operasional angkutan penyeberangan khusus di lintas Ketapang-Gilimanuk selama periode PPKM Darurat. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menjelaskan bahwa akan berlaku larangan penumpang pejalan kaki dan kendaraan penumpang pada waktu operasi sejak Rabu, 14 Juli 2021 sampai dengan selesainya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan 06.00

waktu maksimal 1 x 24 jam atau on site sebelum keberangkatan.

"Selain itu sebagai persyaratan perjalanan juga harus mengisi e- HAC Indonesia. Hal ini kami imbau lagi kepada masyarakat karena hingga saat ini pelaku perjalanan di penyeberangan Jawa-Bali masih banyak yang belum memenuhi persyaratan tersebut. Terutama syarat kartu vaksin yang belum dapat dipenuhi oleh sejumlah calon penumpang," ujar Dirjen Budi.

Saat ini, Dirjen Budi dan jajarannya juga akan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat khususnya calon penumpang untuk melengkapi syarat perjalanan tersebut sebelum bepergian sehingga dapat meminimalisir antrian maupun kerumunan di Pelabuhan Penyeberangan.

"Kami dari Ditjen Hubdat mengimbau untuk para petugas di lintasan Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, dan Padangbai-Lembar untuk lebih mengantisipasi persyaratan masyarakat ini agar tidak terjadi antrian panjang saat pemeriksaan syarat perjalanan. Meski demikian kami menekankan juga bagi masyarakat untuk tetap tidak bepergian jika tidak ada keperluan yang mendesak," katanya.*

WIB (di Pelabuhan Ketapang) dan pukul 20.00 WITA sampai dengan 07.00 WITA (di Pelabuhan Gilimanuk) untuk memperkuat pemberlakuan PPKM Darurat. Dirjen Budi memastikan bahwa pada waktu tersebut kendaraan logistik akan tetap dilayani dan dapat beroperasi penuh.

"Untuk ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dalam SE Dirjen Hubdat. Pelaksanaan PPKM Darurat sejauh ini di Ketapang-Gilimanuk kurang maksimal. Masih ditemukan penumpang yang sudah menyeberang ke Gilimanuk namun hasil *rapid Test* Antigennya positif, sehingga perlu dilakukan pengetatan di Pelabuhan Ketapang sebagai bentuk antisipasi," jelas Dirjen Budi.

Dirjen Budi juga meminta PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengupdate aplikasi Ferizy sehingga memuat informasi tentang penumpang pejalan kaki dan kendaraan penumpang yang tidak diperbolehkan membeli tiket pada malam hari sesuai waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu kepada calon penumpang pejalan kaki dan kendaraan penumpang, diimbau untuk mengatur perjalanan sehingga tidak tiba saat malam hari. Selain itu juga ada penambahan persyaratan pembeli tiket agar dilengkapi dengan hasil negatif *rapid test* Antigen dan kartu vaksin.*





Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi didampingi Direktur Angkutan Jalan Ahmad Yani menyerahkan bantuan sembako kepada driver ojol. Kementerian Perhubungan memberikan bantuan sembako kepada sekitar 100 pengemudi ojek online baik dari aplikasi Grab, Gojek, dan Shopee Food, di Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta (22/7/2021). Foto: HMS DJPD/MAD.

AKTIF BERKOLABORASI, DITJEN HUBDAT LAKUKAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN COVID-19 DI SIMPUL TRANSPORTASI DARAT

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menyampaikan bahwa jajarannya tengah aktif melakukan penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di simpul-simpul transportasi khususnya Terminal Tipe A dan Pelabuhan Penyeberangan. Berkolaborasi dengan sejumlah pihak seperti Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dirjen Budi pada Minggu (8/8) menyatakan bahwa tim tersebut telah melakukan pemeriksaan tes antigen, vaksinasi massal, serta pemberian bantuan sembako di sejumlah daerah.

“Kami sadar saat ini adalah masa yang sulit bagi masyarakat akibat pandemi Covid-19, oleh karena itu kami dari Kemenhub sesuai arahan Menteri Perhubungan melakukan sejumlah upaya untuk membantu masyarakat. Untuk penyediaan rapid test antigen di terminal memang berbayar, sementara di pelabuhan penyeberangan tidak berbayar. Di pelabuhan penyeberangan ada di 5 tempat yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, dan Makassar. Untuk peralatan tes di pelabuhan disediakan oleh Kemenkes, Pelindo II, Pelindo III, Pelindo IV, maupun mitra-mitra Perhubungan seperti APM,” jelas Dirjen Budi.

Pelaksanaan antigen berbayar dilakukan di 4 terminal yaitu Tirtonadi, Purworejo, Tingkir, dan Pulo Gebang dengan total tes sebanyak 3.114 orang. Sementara pelaksanaan antigen gratis di pelabuhan penyeberangan secara khusus disediakan bagi pengemudi angkutan logistik.

Selain itu kegiatan vaksinasi digelar di 14 Terminal Tipe A dan Pelabuhan Penyeberangan yang bekerjasama dengan Marinir. 14 Terminal Tipe A tersebut yaitu:

1. Terminal Pakupatan Serang,
2. Terminal Leuwipanjang Bandung,
3. Terminal Guntur Garut,
4. Terminal Indihiang Tasikmalaya,
5. Terminal Bulupitu Purwokerto,
6. Terminal Tirtonadi Surakarta,
7. Terminal Arjosari Malang,
8. Terminal Gayatri Tulungagung,
9. Terminal Kertonegoro Ngawi,
10. Terminal Purabaya Surabaya,
11. Terminal Pulogebang Jakarta Timur,
12. Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur,
13. Terminal Mengwi Badung,
14. Terminal Tangkoko Bitung.

“Saat ini realisasinya per 6 Agustus kami telah melaksanakan vaksinasi terhadap 11.090 orang. Dari 14 terminal tersebut, 6 terminal yang belum melaksanakan kegiatan vaksinasi karena masih menunggu

ketersediaan vaksin di Dinas Kesehatan,” jelas Dirjen Budi.

Untuk vaksinasi di Pelabuhan Penyeberangan telah terdata sebanyak 3.388 orang yang telah melakukan vaksinasi. “Kegiatan di Pelabuhan Penyeberangan kami lakukan di beberapa pelabuhan seperti di Padangbai, Merak, Ketapang, Bakauheni, dan Gilimanuk,” ujar Dirjen Budi.

Sementara pemberian bantuan sosial berupa paket sembako telah dilaksanakan sejak 19 Juli lalu di 5 lokasi yakni: 1. Pelabuhan Ketapang sebanyak 300 paket sembako; 2. Kantor Walikota Bogor sebanyak 500 paket sembako; 3. Pelabuhan Merak sebanyak 100 paket sembako; 4. Terminal Leuwipanjang sebanyak 1.000 paket sembako; 5. Kantor Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Bogor sebanyak 300 paket sembako.

“Kami berharap baik kegiatan tes antigen, vaksinasi massal, maupun pemberian bantuan paket sembako ini benar-benar dapat bermanfaat baik bagi mitra transportasi seperti pengemudi, kondektur, maupun masyarakat umum yang terdampak pandemi. Selain itu kami tengah berupaya untuk membahas rencana pemberian bantuan langsung tunai berupa subsidi upah dan bantuan lainnya bagi tenaga kerja angkutan moda jalan dan mitra transportasi darat,” ungkap Dirjen Budi.*



◀ Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sambutan pada kegiatan Serbuan Vaksinasi Covid-19 Ship to Ship TNI Angkatan Laut Bersama Kementerian Perhubungan RI, PT ASDP dan KKP II Banten, 27/7/2021. Foto: HMS DJPD/BYU



◀ Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kegiatan Pemberian Bantuan Sosial dari Kementerian Perhubungan bersama Forkompmda Provinsi Jawa Barat, Bandung, 4/8/2021. Foto: HMS DJPD/BYU





▶ Kegiatan Vaksinasi serta Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 dan Pemberian Bingkisan Buah Nusantara, di Terminal Jati Jajar, Jawa Barat, 11/8/2021. Foto: HMS DJPD/WBW



▶ Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama pejabat terkait melakukan peninjauan dan pelepasan kapal pengangkut bus dalam rangka dukungan PON XX Papua dan Peparnas XVI, Dermaga Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priuk, 24/8/2021. Foto: HMS DJPD/MAD



▲ Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama pejabat terkait lainnya dalam kegiatan vaksinasi massal dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat di Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, 28/8/2021. Foto: HMS DJPD/BYU



◀ Kunjungan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi ke Galangan Kapal PT IKI Makassar serta Pelaksanaan Vaksinasi Bagi Pengemudi Truk dan Transportasi Online di Area Pelabuhan Makassar, 25/8/2021. Foto: HMS DJPD/MAD



◀ Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama pejabat terkait dalam kegiatan vaksinasi massal dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat di Terminal Bulupitu, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, 4/9/2021. Foto: HMS DJPD/BYU



LENSA HUBDAT

► Kunjungan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi meninjau kesiapan Sirkuit Superbike Mandalika, Nusa Tenggara Barat, 11/9/2021. Foto: HMS DJPD/MAD



► Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2021, Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, 17/9/2021. Foto: HMS DJPD/WBW



► Kunjungan kerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan pejabat terkait lainnya ke Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kalimantan Barat, 19/9/2021. Foto: HMS DJPD/MAD

